

**KEPENTINGAN INDONESIA PADA PENYELENGGARAAN
*UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON
CLIMATE CHANGE (UNFCCC) 2007 DI BALI***

***(THE INDONESIAN INTEREST ON UNITED NATIONS FRAMEWORK
CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC) 2007
IN BALI***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**ANITA PATIMAH
20040510064**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH YOGYAKARTA
2009**

KEPENTINGAN INDONESIA PADA PENYELENGGARAAN *UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE* (UNFCCC) 2007 DI BALI

(*THE INDONESIAN INTEREST ON UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE* (UNFCCC) 2007 IN BALI

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Meraih Gelar

Kesarjanaan Dalam Strata I (S1)

Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dengan Spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional

Diajukan Oleh:

ANITA PATIMAH

20040510064

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH YOGYAKARTA
2009**

HALAMAN PENGESAHAN

KEPENTINGAN INDONESIA PADA PENYELENGGARAAN *UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC)* 2007 DI BALI

**ANITA PATIMAH
20040510064**

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Pendarasan,
Dinyatakan dan Disahkan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Hari / Tanggal : 28 Januari 2009
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Ruang HI C

Mengetahui

Ketua

Drs. Djumadi M. Anwar M.Si.

Penguji I

Penguji II

Drs. Husni AP, M.Si

Dra. Mutia Hariati H, M.Si.

ABSTRAK

Global warming merupakan isu yang beberapa tahun belakangan ini marak dibicarakan. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari global warming itu tidak hanya berdampak pada satu pihak saja, akan tetapi masalah global warming sangatlah kompleks. Global warming sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan baik kehidupan politik, ekonomi, perdagangan, pariwisata, maupun sosial dan budaya.

Dikarenakan dampak dari global warming yang begitu kompleks, maka masyarakat di dunia, terutama, melakukan berbagai cara untuk mengurangi dampak dari global warming. Berbagai cara dilakukan untuk menggali kesadaran akan berbahayanya global warming. Pencegahan global warming dilakukan dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar. Baik oleh individu sampai di tingkat negara.

Seperti halnya penyelenggaraan konferensi perubahan iklim (UNFCCC) di Bali, Desember yang lalu. Pada konferensi ini dihadiri delegasi dari beberapa negara yang concern terhadap global warming. Dengan diselenggarakannya konferensi tersebut, diharapkan dampak dari global warming dapat dikurangi dan ditekan seminimal mungkin. Pada konferensi ini menghasilkan apa yang disebut dengan "Bali Road Map" yakni: Komitmen Pasca 2012 (Dialogue & AWG), dana adaptasi, transfer teknologi, REDD (Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries) dan CDM (Clean development Mechanism).

Sebuah rumusan pokok permasalahan diambil dari isu mengenai global warming, adalah bagaimanakah kepentingan Indonesia pada penyelenggaraan UNFCCC di Bali? Pertanyaan ini akan coba dijawab dengan Konsep Kepentingan Nasional & Konsep Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri (William D. Coplin). Dari konferensi ini Indonesia memperoleh prestise dengan cara menyediakan tempat pertemuan yang nyaman, keamanan yang terjamin, serta persiapan yang matang atau terorganisasi guna suksesnya konferensi ini. Selain itu citra Indonesia sebagai sarang teroris berangsur pulih dengan indikasi naiknya jumlah wisatawan pasca UNFCCC di Bali.

Dengan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan UNFCCC di Bali, Indonesia memperoleh banyak hal yakni prestise dan pemulihan citra bangsa Indonesia pasca teror "Bom Bali", dengan begitu Indonesia akan dicatat sebagai negara yang ikut dalam pencegahan dampak perubahan iklim serta pulihnya citra Bali akan membawa dampak yang baik bagi Bali terutama, berkaitan dengan sektor ekonomi serta pariwisata. Melalui UNFCCC ini Indonesia dapat memperlihatkan kepada dunia kemampuan Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah tentu jauh dibawah negar maju, akan tetapi mampu menjadi tuan rumah bagi *event* besar ini dengan aman dan sukses.

MOTTO

- Jalan terbaik untuk menemukan dirimu adalah dengan menenggelamkan dirimu dalam usaha melayani orang lain. (MAHATMA GANDHI)
- Where there's no vision, the people perish. (NN)
- Tak ada gunanya mencoba apapun untuk membantu orang yang tidak membantu dirinya sendiri, kita tak bisa mendorong seseorang untuk naik tangga jika dia tak mau melangkah sendiri. (Andrew Carnegie)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "KEPENTINGAN INDONESIA PADA PENYELENGGARAAN *UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC) 2007 DI BALI*" yang pada kesempatan ini penyusun mengakui bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, maka penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. H. M. Dasron Hamid, M.Sc, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Grace Lestariana W.,SIP.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Siti Muslikhati, SIP.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Djumadi.M.Anwar,M.Si selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak Drs. Husni AP.,M.Si, selaku Dosen Penguji I.
6. Ibu Dra.Mutia Hariati. H.,M.Si selaku Dosen Penguji II.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
8. Seluruh staf TU FISIPOL.
9. Seluruh staf perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
10. Bapak Jumari yang selalu sabar ngehadepin kita.

11. Almamaterku dan semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan bapak/Ibu/Saudara baik yang berupa moril maupun materil dalam rangka penyusunan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT. Amin.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil penelitian sangat dapat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Dan akhirnya penulis mengucapkan semoga hasil penelitian ini bermanfaat.

Wassalamualaikum wr,wb.

Yogyakarta, 10 Februari 2009

Penyusun

Anita Patimah

HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI UNTUK:

**ALLAH SWT YANG TELAH MENGIJINKAN KU HIDUP DI BUMINYA YANG
SEMAKIN TUA, SEHINGGA AKU BISA SENANTIASA BELAJAR DI TIAP
DETIK YANG BERLALU DARI HIDUP KU...**

**UNTUK BAPAK DAN IBU TERHEBAT YANG PERNAH ADA, TERIMA KASIH
UNTUK SEMUA HAL HINGGA MENJADIKAN KU SEPERTI INI...**

**UNTUK KEDUA ADIKKU YANG SELALU MEMBERI SEMANGAT DAN
DORONGAN...**

**UNTUK SEMUA KELUARGA BESAR KU DAN TEMAN-TEMAN YANG SELALU
MENDUKUNGGU SELAMA INI...**

DAN ALMAMATER KU TENTU SAJA....

THANKS TO

- Allah SWT, di setiap keluh ku Kau berikan banyak hal yang selalu menjadikanku manusia lebih baik. Maaf selama ini aku terlalu banyak mengeluh...dan semua pertanyaan konyol ku pada MU...! tanpaMU aku tentu tak kan sampai di titik ini...
- Nabi Muhammad SAW, aku tak sabar menanti pertemuan itu...
- Super dad 'n super mom, terimakasih buat do'a dan nasehatnya selama ini. Maaf buat KETERLAMBATAN ini...! Maaf juga selalu membantah, tak pernah bermaksud jadi anak pembangkang, hanya saja kami punya cara kami sendiri untuk tumbuh...!!! Biarkan anak-anakmu ini berkembang, biarkan kami berproses...!!!
- Keluarga besar ku...thank's so much buat dukungan dan do'anya selama ini....(maaf g'bisa nyebutin satu-satu,he...!)
- Adik ku Anwar, makasih dah bisa diajak BRAIN STORMINGan, bantuin ngisiin tinta buat ngeprint juga, he...!(Yang rajin kuliahnya, jaga sikap moody mu, pa lagi m orang yang lebih tua. Kita itu hidup g'sendiri, jangan merasa paling pintar n'bisa segalanya. Berbagi itu penting!) Adikku nurul yang paling cerewet yang sukanya malah bikin ribet hidup ku aja.Ha.ha.ha..ha!!!(yang rajin sekolahnya, jangan males jadi cewek, boleh centil, tapi jangan bodo kebangetan gitu!!!)
- Mbak DIAN n' RANI..., akhirnya aku nyusul kalian juga!ha.ha.ha....ha!!! LET'S SAY "WELCOME TO THE REAL WORLD"! it's just a beginning guys....! terutama buat aku, SI MANUSIA TELAT !!!ha.ha.ha...ha!!!
- Temen-temen di HI B khususnya, panjul, cipo, nanank, adi 'ndut, adi cilik, sigit, indra, budek. Ayo kapan menjelajah pantai lagi?? selanjutnya pantai mana yang mau kita jamah??he...
- Dika, Samsu, teman waktu magang! kalau g'ada kalian mo magang di mana aku?!he...(ayo kapan nyusul aku?he...)
- Temen-temen HI angkatan 2004...
- Temen seperjuangan on the last minute...! PUJI...NIA..., akhirnya kita lulus bareng!he...
- Mbak TRI ..., mbak RINA AGY COM...(Thank's dah dieditin smua-muanya!!! Kalau g'da mbak nasibnya skripsi ku mboh!he... thank's alot pokok'e!!!
- Buat adik ipar ku..."TOPAN GANTENG" ngarep lo!!!ha.ha.ha....ha!!! makasih buat dukungannya 'n joke-joke ra mutu mu,hu...!!! sukses buat "DREAM SOCIETY" m "DE'VINA nya. You know what? You're so talented, aku

yakin kamu pasti bisa jadi kaya' yang kamu mau, yang penting serius n' fokus!!! SEMANGAAA....D!!!

- **Buat teman TERBAIK ku, tanpa perlu ku sebut siapa dirimu, itu memang kamu....! Thank's for accompany me for all of this years....!dukungan mu, kebaikan mu untuk mendengarkan semua keluh kesah ku....! Di setiap delusi yang datang pada ku, cuma kamu yang mampu menyadarkan ku! Kita sering berbeda, tapi semua itu tak penting! Sampai detik ini pendengar terbaik ku ya Cuma kamu...! Utang ku banyak ma kamu ndhoetZ...!**
- **Buat IBNU teman... ku!makasih dah transletin BAB II ku. Meskipun aku hanya mengenalmu sebentar, tapi semuanya berarti...teman! Tak ada yang kebetulan di dunia ini, begitu juga dengan pertemuan kita. Banyak kesamaan di antara kita, so we must struggle together! Hidup emang g' pernah adil, sob...! Di mana pun kamu berada, aku yakin kamu pasti selalu inget n' do'ain aku di sini...! Ini buat kamu...**
- **Kehidupan..., yang kita tak pernah tahu kemana ujungnya...!!!**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
THANKS TO	v
ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR DIAGRAM/ GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Pokok Permasalahan	6
C. Kerangka Pemikiran	6
D. Hipotesa	13
E. Metode Penelitian	13
F. Tujuan Penelitian	14
G. Jangkauan Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II SEJARAH <i>UNITED NATIONS FRAME WORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE</i> (UNFCCC).....	17
A. Perjalanan (UNFCCC).....	20
B. Tujuan UNFCCC	28
C. Negara-negara anggota UNFCCC	30
D. Perkembangan (UNFCCC	31
BAB III INDONESIA DAN UNFCCC di Bali	39
A. Politik Luar negeri RI atas Penyelenggaraan UNFCCC di Bali	39
B. Penyelenggaraan UNFCCC di Bali	48
C. Prospek Indonesia dalam UNFCCC	52
BAB IV KEPENTINGAN INDONESIA PADA PENYELENGGARAAN <i>UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE</i> (UNFCCC) di Bali	62
A. Kepentingan Nasional Indonesia Perode 2004-2009	65
B. Indikasi Tercapainya Prestige serta Citra (image) Indonesia sesudah penyelenggaraan UNFCCC di Bali	69
C. Hasil dari UNFCCC di Bali.....	78
BAB V KESIMPULAN	85
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pengaruh Partikel Emisi terhadap Kesehatan dan Lingkungan (Princiota, 1991)	53
Tabel 3.2 Gas Rumah Kaca dan Potensi Pemanasan Global	55
Tabel 3.3 Biaya Pengurangan Emisi CO ₂	59
Tabel 4.1 Indikator Keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara UNFCCC (Prestige)	73
Tabel 4.2 Indikator Keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara UNFCCC (Citra/image)	74
Tabel 4.3 Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Pelabuhan, Januari –Juli 2008 dan 2007	76
Tabel 4.4 Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Kebangsaan, Juli 2008.....	76

DAFTAR DIAGRAM/ GAMBAR

Diagram 1.1 Teori Politik Luar Negeri (William D. Coplin)	10
Gambar 3.1 Proyeksi Emisi CO ₂	54
Gambar 3.2 Emisi CO ₂ dari negara-negara yang dipilih (1995)	55
Gambar 3.3 Kurva CERI untuk Indonesia	60
Gambar 4.1 Skema Kepentingan Indonesia pada penyelenggaraan UNFCCC	65

BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali Indonesia biasa dikatakan sebagai alat atau sarana untuk memperbaiki citra diri bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan diselenggarakannya *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali diharapkan dunia akan tidak menganggap remeh Negara Indonesia. Meskipun Indonesia termasuk dalam Negara berkembang, akan tetapi mau dan mampu menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Dengan begitu dunia akan tahu bahwa Indonesia yang Negara berkembang saja, sangat perhatian atau *concern* terhadap lingkungan khususnya pada perubahan iklim. Di mana dewasa ini perubahan iklim menjadi isu yang sangat kompleks yang beredar di masyarakat dan berdampak sangat besar pula bagi kehidupan. Perubahan iklim sangat berdampak sekali bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk di dunia. Dampak dari perubahan iklim antara lain: krisis pangan karena kekeringan, banjir besar, pulau-pulau akan tenggelam dan rusaknya daerah pesisir karena peningkatan permukaan laut dan kerusakan-kerusakan alam lain yang tentu saja memprihatinkan dan merugikan banyak pihak.

Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan efek rumah kaca yang terjadi di bumi. Pada dasarnya, efek rumah kaca menyebabkan atmosfer bumi menjadi hangat dan membuat bumi dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Tanpa efek rumah kaca, bumi akan menjadi planet yang amat dingin. Akan tetapi, efek rumah kaca

tersebut mengalami peningkatan beberapa dekade ini. Adapun contoh gas-gas yang dapat menyebabkan efek rumah kaca ialah CO₂, CH₄, NO_x, SO_x, CFC, SF₆, H₂O, dan CFC.¹ Dengan diadakannya konvensi ini Negara-negara penyumbang gas rumah kaca dapat dihimbau untuk mengurangi pengeluaran gas rumah kaca mereka terutama negara-negara industri di negara maju.

Selain itu Indonesia juga dapat mengembalikan citra buruk Indonesia yang terkenal sebagai sarang teroris khususnya di Bali. Dengan menyelenggarakan konvensi tersebut di Bali, Indonesia diharapkan para wisatawan dapat kembali berkunjung ke Indonesia khususnya Bali tanpa perasaan takut.

Melalui penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali Indonesia, diharapkan sebagai sarana untuk memperlihatkan potensi Indonesia di mata dunia secara keseluruhan terutama dalam perhatiannya terhadap perubahan iklim selain itu juga mengembalikan citra bangsa Indonesia di mata dunia. Sehingga tema kepentingan Indonesia Pada Penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali Indonesia menjadi tema yang menarik dari dinamika hubungan internasional, dan melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi khalayak yang membutuhkan hal-hal tentang khasanah Hubungan Internasional.

¹ Adj 94.wordpress.com

A. Latar Belakang Masalah

Konferensi ini adalah sebuah upaya untuk merespon perubahan iklim yang berhubungan dengan pembangunan. Diadopsi pada 1992, UNFCCC merancang sebuah kerangka aksi yang bertujuan menstabilisasi gas rumah kaca pada sebuah level yang bisa melindungi manusia dari efek yang sangat berbahaya dari perubahan iklim. Bagi Indonesia, perubahan iklim merupakan ancaman yang serius, contohnya : krisis, pangan karena kekeringan, rusaknya infrastruktur karena banjir, pulau-pulau yang tenggelam dan rusaknya daerah pesisir karena peningkatan permukaan laut. Diikuti dengan meningkatnya kasus penyakit tropis, dan punahnya beberapa spesies karena tak mampu beradaptasi.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) kemudian digerakkan pada 21 Maret 1994 dan kini sudah memiliki 186 partisipan dari berbagai negara.

Pada COP-3 yang diadakan di Kyoto, Jepang pada Desember 1997, Negara partisipan setuju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Enam gas yang harus dikurangi adalah karbondioksida, metana, nitrus oksida, sulfur, heksafluorida, dan klorofluorokarbon.

Indonesia merupakan salah satu diantara Negara-negara anggota UNFCCC yang sangat penting dalam meminimalisasi meningkatnya pemanasan global dan perubahan iklim. Sebab, Indonesia memiliki ribuan hektar hutan yang mampu menyerap CO₂ (karbondioksida) sebagai zat utama penyebab terjadinya *global warming and climate change*. Sebagai Negara yang mempunyai peran

signifikan sebagai *the defender of the earth*, Indonesia akan banyak diharapkan oleh Negara-negara maju untuk menjaga dan melindungi hutannya.

Pada pertemuan COP-13, giliran Indonesia menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yakni tepatnya di Bali. Konferensi Bali penting karena, laporan *UN's Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyebutkan bahwa perubahan iklim global adalah suatu kenyataan, dan secara serius dapat mengganggu pembangunan ekonomi, masyarakat dan ekosistem secara luas.

Terkait dengan ancaman dari perubahan iklim dimana Indonesia terdiri dari negara kepulauan, pesisir, memiliki resiko tinggi dan ancaman bagi pulau-pulau kecil tenggelam, erosi, dan wilayah kesatuan Republik Indonesia akan berkurang, selain itu juga pengungsi internal, meningkat, penyakit meningkat, banjir dan longsor, perubahan masa tanam, rawan pangan (kekeringan) dan rawan air dan pangan akibat badai tropis meningkat. Sedangkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75%), persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,41%) penduduk miskin berada di daerah pedesaan. Tentunya angka kemiskinan dan penyakit akan meningkat dari tahun ke tahun akibat dampak dari perubahan iklim dan ditambah dengan makin sempitnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam.

Akan tetapi dalam kesediaan Indonesia sebagai tuan rumah pada penyelenggaraan konferensi perubahan iklim ini tidak begitu saja mudahnya, tentu diwarnai dengan suara-suara sumbang, terkait dengan sukses tidaknya konferensi tersebut diadakan di Indonesia lebih tepatnya di Bali.

Indonesia patut berbangga sehingga bisa menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) karena selama ini Indonesia di mata dunia selalu dianggap remeh. Mulai dari masalah keamanan, di mana beberapa waktu lalu Indonesia, lebih tepatnya di Bali pernah diguncang bom, yang terkenal dengan sebutan “Insiden Bom Bali”, yang dilakukan oleh teroris yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan infrastruktur rusak, banyaknya korban yang meninggal baik dari warga lokal maupun turis asing serta korban luka-luka yang kelewat banyaknya. sampai-sampai pemerintah Bali pun membuatkan tugu peringatan bagi korban yang meninggal akibat Bom Bali beberapa waktu lalu. Kondisi perekonomian dan pariwisata juga terpuruk. Banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar karena insiden tersebut, terutama UKM-UKM.

Dengan penyelenggaraan konferensi perubahan iklim ini di Indonesia diharapkan citra Bali akan meningkat dengan adanya publikasi dari media-media asing yang meliput jalannya konferensi ini mengindikasikan tingkat keamanan yang sudah baik dan kepercayaan masyarakat dunia terhadap Indonesia kembali sehingga sektor perekonomian di Bali akan kembali pulih, misalnya peningkatan jumlah wisatawan sesudah diselenggarakannya konferensi perubahan iklim yang

berkunjung di Bali. Pemulihan citra Bali ditandai dengan prestise yang diperoleh, seperti, banyaknya negara yang hadir dalam konferensi tersebut, jumlah LSM Asing yang ikut berpartisipasi, sistem keamanan yang diberlakukan guna suksesnya konferensi ini, transportasi yang mendukung, tempat penyelenggaraan yang nyaman, serta lingkungan yang mendukung.

Namun, di tengah pandangan dunia yang selalu saja menganggap sebelah mata pada Indonesia, Indonesia melalui Bali ternyata dapat menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali dan secara umum dipandang sukses, karena terpenuhinya kepentingan-kepentingan Indonesia sehingga berdampak baik pada pembangunan Indonesia sendiri.

B. Pokok Permasalahan

Mengapa Indonesia bersedia menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali ?

C. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Kepentingan nasional (*National Interest*) Oleh Jack C. Plano dan Roy Olton²

Konsep kepentingan nasional oleh Jack C. Plano dan Roy Olton diberi batasan sebagai berikut:

² Jack C. Plano dan Roy Olton, *International Relations Dictionary*, Rinehart and Winston Inc USA, 1969, hal. 128

Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan (*Decision making*) dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum dan merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara untuk mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.

Pengertian kepentingan nasional suatu negara bisa tergantung dari sumber daya alam yang tersedia untuk dapat memaksa atau meyakinkan negara lain untuk bekerja sama dalam ruang lingkup, dimana semua negara memiliki kepentingan masing-masing. Konsep kepentingan nasional ini berkaitan dengan adanya cita-cita serta tujuan dari suatu negara, yang berusaha dicapai melalui hubungan serta kerjasama yang solid dan harmonis dengan negara lain.

Menurut Hans J.Morgenthau kepentingan nasional merupakan pilar utama untuk mendukung politik luar negeri dan politik internasional suatu Negara. Kepentingan nasional suatu negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Kekuasaan tidak akan tercapai tanpa adanya kekuatan nasional dan politik suatu negara tidak lepas dari kepentingan nasional,

karena tujuan politik luar negeri adalah mencari, mempertahankan dan memperkuat kepentingan nasional.³

Atas kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan UNFCCC, Indonesia mempunyai beberapa kepentingan. Kepentingan itu bisa berbagai macam, baik itu bersifat politik, ekonomi dan tentu saja yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Dengan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan konferensi ini Indonesia akan memperoleh prestige, karena *event* ini merupakan *event* akbar yang digerakkan oleh PBB yang dihadiri hampir dari keseluruhan masyarakat dunia. Baik itu peserta yang datang dari berbagai belahan dunia, LSM-LSM asing, serta wartawan-wartawan dari media asing maupun lokal meliput adanya *event* ini. *Event* ini merupakan ajang pembuktian bagi Indonesia bahwa Indonesia meskipun negara yang selalu dianggap remeh, bukan negara maju, mampu menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan *event* akbar berkaitan dengan masalah lingkungan dan terselenggara dengan sukses dan aman. Hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan bagi *event* ini sangat diperhatikan oleh Indonesia sebagai tuan rumah seperti keamanan, penyediaan transportasi, penyediaan tempat konferensi, suasana atau lingkungan yang nyaman serta mendukung bagi terlaksananya konferensi ini, semua telah terorganisasi dengan baik demi terselenggaranya konferensi dengan sukses.

³ H. J. Morgenthau, *Politik Antarbangsa*, Buku Ketiga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, hal 5.

Selain itu, Indonesia juga dapat memperbaiki citranya sebagai negara “sarang teroris” pasca serangan “bom Bali” sehingga kepercayaan masyarakat dunia terhadap Indonesia kembali pulih. Pada konferensi ini juga telah dihasilkan yakni “Bali Road Map” dimana didalamnya mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pencegahan global warming, yakni mekanisme atau aturan-aturan yang dibuat untuk mengurangi dampak dari global warming di luar Protokol Kyoto.

2. Konsep Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri Oleh William D, Coplin (1973)⁴

Menurut Coplin, pengambilan keputusan yang berkonsekuensi pada sistem politik luar negeri oleh elit suatu negara harus dapat memperhatikan pada dinamika:

- a. Kondisi ekonomi-ekonomi global (*Economy Politic Regional and International Conditions*)
- b. Kondisi militer dan sistem pertahanan (*Military and Defense Capability*)
- c. Kondisi lingkungan global (*International political conditions*)

Kondisi-kondisi tersebut tidak berdiri sendiri namun mempunyai keterkaitan (interdependensi) yang saling mempengaruhi, apabila salah satu kondisi dilemahkan maka akan berpengaruh juga pada kondisi yang terdekat, sebagai salah satu contoh kondisi orientasi pertahanan dan militer suatu negara kapabilitasnya sangat dipengaruhi oleh tatanan global apakah kawasan itu

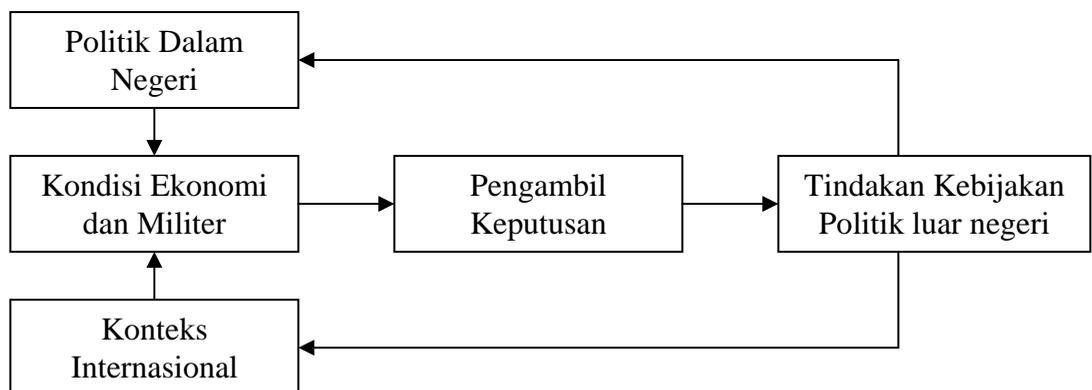
⁴ William D. Coplin , *Dalam Pengantar Politik Internasional (telaah dan teoritis)*. Pustaka Sinar Baru. Bandung. 1992.

lebih condong ke konflik terbuka, konflik perbatasan ataupun kawasan yang berkondisi stabil (damai).

Dalam menganalisa masalah tersebut, penulis juga akan menggunakan teori pembuatan keputusan luar negeri dari Wiliiam D. Coplin serta sebagaimana tercantum dalam GBHN, kebijakan pemerintah Indonesia haruslah diabdikan untuk kepentingan Nasional. Oleh karena itu, untuk lebih memperjelas analisa, maka penulis menggunakan Konsep Pembuatan Keputusan luar negeri Menurut William D. Coplin:

“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara pertimbangan(konsiderasi). Tetapi sebaliknya tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebjakan luar negeri: pertama, kondisi politik dalam negeri termasuk faktor budaya yang mendasari tinglah laku politik manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer Negara tersebut termasuk factor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan/keamanan. Ketiga, konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.”

Diagram 1.1 Teori Politik Luar Negeri (William D. Coplin)



Keterangan:

1. Kondisi politik dalam negeri

Menurut Coplin kondisi politik dalam negeri suatu Negara merupakan salah satu variable penentu dalam pembuatan keputusan luar negeri Negara tersebut. Termasuk sistem politik yang diterapkan, perbedaan antara sistem politik autokratis dan sistem politik demokratis mempengaruhi penyusunan politik luar negeri. Selain itu stabilitas politik juga mempengaruhi dalam pembuatan politik luar negeri.

Keterkaitan antara kondisi politik dalam negeri juga bisa dibuat kerangka konseptual berfokus pada hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri (*policy influencers*).

Peran politik dalam negeri terhadap tindakan politik luar negeri juga bisa dianalisa melalui struktur sistem pengaruh kebijakan, serta peran sistem itu dalam perumusan politik luar negeri. Politik dalam negeri merupakan seperangkat determinan bagi pembuatan politik luar negeri. Dengan melihat atribut-atribut sistem politik luar negeri, seperti terbuka-tertutup atau stabil-tidak stabil bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu.

2. Kondisi Ekonomi dan Militer

Kondisi ekonomi dan militer memainkan peranan penting dalam proses penyusunan politik luar negeri, dengan memberikan dukungan dan tuntutan kepada para pengambil keputusan politik luar negeri. Komitmen

suatu Negara harus diimbangi dengan kemampuan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya.

Untuk mengamati peran kemampuan ekonomi terhadap politik luar negeri suatu negara yaitu dengan melihat kekuatan ekonomi Negara tersebut yang bisa diukur dengan kapasitas produksi barang dan jasa (GNP) dan tingkat kebergantungan pada perdagangan finansial internasional. Sementara itu tingkat kemampuan militer dapat diukur melalui jumlah tentara, kualitas perlengkapan dan tingkat latihan.

3. Konteks Internasional

Konteks Internasional yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem itu. Sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu menentukan bagaimana negara akan berperilaku.

Konteks Internasional mengenai faktor-faktor geografis, ekonomi dan politis. Letak wilayah penting dalam menetapkan konteks Internasional suatu Negara dalam bidang yang berkaitan dengan logistik, militer. Pola perdagangan, pola aliansi dan sebagainya. Hubungan ekonomi juga merupakan bagian penting dalam Konteks Internasional, yaitu meliputi arus dagang dan jasa maupun arus modal yang telah membuat negara saling bergantung. Hubungan politik dalam Konteks Internasional sangat berperan dalam keputusan-keputusan politik luar negeri suatu Negara.

Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa kepentingan nasional bersumber dari seluruh nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional juga merupakan faktor penting bagi setiap negara dalam melaksanakan politik luar negeri suatu negara, di mana ia tidak hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan bagi pertimbangan strategi untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga akan menentukan pilihan skala prioritas politik luar negeri suatu negara.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang ada maka, Indonesia bersedia menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali karena penyelenggaraan konvensi tersebut dapat menjadi media tercapainya sebagian kepentingan nasional Indonesia menurut Departemen Luar Negeri RI yaitu kepentingan Nasional yang bersifat prestige dan citra bangsa.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari 3, yaitu:

1. Teknik mencari data atau mengumpulkan data

Semua bentuk penerimaan data yang dilakukan adalah dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya. Dalam penelitian

ini akan menggunakan sistem pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, data diperoleh dan disusun melalui buku, surat kabar, jurnal ilmiah, dan website.

2. Teknik analisa data

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisa kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan sejenis itu.⁵

3. Teknik menarik kesimpulan

Kesimpulan penelitian harus dibuat berdasarkan data yang diperoleh, dan harus sinkron dengan problematika dan hipotesis.⁶ Terhadap data yang bersifat kualitatif, maka pengolahannya dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti.⁷

F. Tujuan Penelitian

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab permasalahan tentang kepentingan-kepentingan Indonesia sebelum, ketika, dan sesudah penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali dengan teori yang relevan dan membuktikan hipotesa dengan menggunakan data-data dan fakta.

⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, CV.Rajawali, Jakarta, 1990, hal.95

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 354

⁷ Suharsimi Arikunto, *op.cit* hal. 348

G. Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup ini merupakan suatu upaya untuk menghindari diri dari penulisan yang terlalu melebar sehingga mengaburkan pokok permasalahan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan tulisan ini.

Dari berbagai pertimbangan, penulis menentukan ruang lingkup pembahasan ini pada penyelenggaraan UNFCCC di Bali pada akhir bulan Desember 2007 yang lalu sampai pasca penyelenggaraan UNFCCC pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Ditentukannya rentang waktu hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, adalah untuk menunjukkan kepentingan-kepentingan Indonesia sebelum, ketika dan sesudah penyelenggaraan UNFCCC bulan Desember yang lalu. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada rentang waktu tersebut yang berkaitan dengan pokok pembicaraan adalah merupakan sumber data penelitian dan bisa digunakan jika masih relevan atau ada keterkaitan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan dibagi dalam lima bab:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang perjalanan UNFCCC, tujuan UNFCCC, negara-negara anggota UNFCCC, perkembangan UNFCCC.

Bab III membahas tentang politik luar negeri Indonesia atas penyelenggaraan UNFCCC di Bali, penyelenggaraan UNFCCC di Bali, prospek Indonesia dalam UNFCCC.

Bab IV membahas kepentingan-kepentingan Indonesia atas penyelenggaraan UNFCCC di Bali bagi pembangunan serta kemajuan Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Bab V berisi kesimpulan, yang akan menggambarkan korelasi antara hipotesa dengan hasil penelitian.

BAB II

SEJARAH *UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE* (UNFCCC)

UNFCCC *The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC or FCCC) adalah perjanjian lingkungan internasional yang dilaksanakan oleh *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), pada dasarnya dikenal sebagai pertemuan bumi, dilaksanakan di Rio de Janeiro tahun 1992. Perjanjian diarahkan untuk menstabilkan efek rumah kaca gas di atmosfer yang sudah berada pada ambang yang berbahaya dengan bercampurnya anthropogenic dengan sistem iklim

Pada aslinya perjanjian tidak membatasi limit gas buang rumah kaca pada setiap negara dan tidak berisi ketentuan - ketentuan; pelaksanaan karena hukum dipertimbangkan tidak memihak.pada dasarnya, perjanjian juga mencakup ketentuan untuk memperbaharui (protokol) yang akan membatasi emisi gas buang.. Ketentuan yang diperbaharui yaitu Protokol Kyoto, yang akan menjadi lebih baik dari pada yang dibuat oleh UNFCCC itu sendiri UNFCCC dibuka untuk ditandatangani pada 9 Mei 1992 dan juga pada 21 Maret, 1994. tujuan dari perjanjian tersebut " untuk menstabilkan efek gas rumah kaca di atmosfer yang sudah berada pada ambang yang berbahaya dengan bercampurnya anthropogenic dengan sistem iklim”

Salah satu dari pencapaiannya adalah badan inventarisasi efek rumah kaca nasional, untuk menghitung efek gas rumah kaca (GRK) gas buang dan

pembersihan. jumlah harus secara reguler disampaikan kepada *United Nations Framework Convention on Climate Change*.

UNFCCC juga masuk ke dalam sekretariat perserikatan negara yang dibebankan untuk mendukung dan bekerja sama, yang berkedudukan di Haus Carstanjen, Bonn, Jerman. sejak 2006 dipimpin oleh Yvo de Boer. Badan tersebut termasuk cabang dari IPCC, dengan tujuan untuk mengambil keputusan dari semua hasil yang didapat.

Keanggotaan UNFCCC dibagi menjadi 3:

- Negara Annex I (negara Industri)
- Negara Annex II (Negara berkembang yang membayar kepada negara yang mengembangkan)
- Negara berkembang

Negara Annex I setuju untuk mengurangi emisi gas buang (khususnya karbon dioksida) untuk menurunkan target emisi gas buang ke tingkat emisi tahun 1990. Jika mereka tidak dapat melakukannya, mereka harus mempunyai kredit emisi gas buang atau menanam modal dalam konservasi. Negara annex II, mereka harus menyediakan sumber daya keuangan untuk negeri yang sedang berkembang, adalah gabungan dari negara annex I terdiri dari anggota OECD, tanpa mereka yang mengalami krisis ekonomi pada tahun 1992.

Negara berkembang tidak segera dalam pembatasan dari UNFCCC. ini mempunyai tiga tujuan:

- Menghindari pembatasan dari perkembangan sebab polusi benar – benar berhubungan dengan pertumbuhan industri, dan perkembangan ekonomi berpotensi sangat cepat
- Itu berarti yang mereka tidak bisa menjual kredit gas buang ke negara-negara industri untuk mendapat izin polusi yang berlebihan.
- Mereka mendapatkan uang dan teknologi dari negara-negara berkembang di Annex II.

Negara-negara berkembang boleh menjadi relawan untuk menjadi negara Annex I ketika mereka cukup untuk dikembangkan.

Negara berkembang tidaklah diharapkan untuk menerapkan komitmen mereka di bawah Konvensi kecuali jika negara maju menyediakan teknologi dan pembiayaan yang cukup, dan ini merupakan prioritas yang lebih rendah dibanding ekonomi dan pembangunan sosial dan berhadapan dengan kemiskinan.

Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa atas perubahan iklim (UNFCCC) telah dibuka untuk ditandatangani tahun 1992 di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Lingkungan dan Pengembangan (UNCED) Konferensi di Rio de Janeiro (yang dikenal oleh sebutan populernya, Perjanjian Bumi). Pada 12 Juni, 1992, 154 negara-negara yang menandatangani UNFCCC, yang ketika pengesahan melakukan perintah harus sama persis sama benar sukarela " tujuan yang tidak mengikat" untuk mengurangi konsentrasi efek rumah kaca dengan tujuan "mencegah gangguan campuran antara anthropogenic berbahaya dengan Sistem iklim bumi." Tindakan ini telah diarahkan terutama pada Negara-negara industri, dengan niat dari menstabilkan emisi mereka dari gas rumah kaca pada 1990

tingkatan oleh tahun 2000; dan tanggung-jawab yang lain dari UNFCCC. tujuan yang disetujui di dalam umum bahwa mereka akan mengenali " umum tetapi tanggung-jawab yang dibedakan," dengan tanggung jawab lebih besar untuk mengurangi efek rumah kaca di dekat negara-negara yang *industrialized*, yang telah didaftarkan dan dikenali.

Menurut persetujuan dari UNFCCC, setelah diterima oleh 50 instrumen *countries* pengesahan itu dimasukkan ke persetujuan 21, 1994 sejak memasukkan UNFCCC ke perserikatan, perkumpulan tersebut bertemu tiap-tiap tahun di dalam *Conferences Of The Parties* (COP) untuk menilai kemajuan dalam berhadapan dengan perubahan iklim, dan bermula di pertengahan tahun 1990an, merundingkan Kyoto Protokol untuk menetapkan hukum untuk mengikat kewajiban dari negara maju untuk mengurangi emisi/pancaran efek rumah kaca mereka.

A. Perjalanan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)

a. COP-1, "Mandat Berlin"

Konferensi UNFCCC jumpa untuk pertama kali di Berlin, Jerman di musim panas tahun 1995, dan perhatian yang dinyatakan tentang ketercukupan dari kemampuan negara untuk berkomitmen di bawah Konvensi itu. Ini telah dinyatakan di U.N. deklarasi menteri menteri Negara perserikatan yang dikenal sebagai sebagai " Mandat Berlin", yang mendirikan ketetapan 2 tahun Analisis dan Penilaian Tahap (AAP), untuk merundingkan " tindakan yang menyeluruh" untuk negara-negara mereka dapat mengambil dan memilih pilihan masa depan mereka yang menunjuk pada perubahan iklim mereka, secara individu, yang membuat lingkungan dan

ekonomi mereka menjadi lebih baik. "Mandat Berlin" yang membebaskan negara-negara non Annex I dari kewajiban tambahan, sehubungan dengan prinsip dari " umum tetapi tanggung-jawab yang dibedakan" yang dibentuk di UNFCCC. Sesungguhnya secara bersama, Negara-negara industri maju yang baru telah diharapkan sebagai emiter yang paling besar dunia dari efek rumah kaca 15 tahun karenanya.

b. COP-2, Jenewa, Swiss

Konferensi yang kedua dari UNFCCC (COP-2) yang dijumpai pada bulan Juli 1996 di Jenewa, Swiss. Deklarasinya telah diadopsi 18 Juli 1996, dan mencerminkan posisi U.S. yang diperkenalkan oleh Timothy Wirth, Sekretaris untuk global affair dari departemen luar negeri Amerika pada pertemuan itu, adalah:

1. Penemuan ilmiah yang diterima atas perubahan iklim yang diajukan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* dalamnya penilaian yang kedua (1995);
2. seragam yang ditolak " Kebijakan yang diselaraskan" menuju ke fleksibilitas;
3. menolak " menurut hukum mengikat ."

c. COP-3, Protokol Kyoto pada Perubahan iklim

Protokol Kyoto pada UNFCCC telah diadopsi oleh COP-3, pada bulan Desember 1997 di Kyoto, Jepang, setelah negosiasi yang intensif. Negara-negara paling terindustrialisasi dan beberapa Negara industri di Eropa pusat di dalam transisi (adalah semua negara-negara yang digambarkan sebagai Annex B) yang disetujui menurut hukum mengikat pengurangan emisi atau pancaran efek rumah kaca dari rata-rata dari 6 sampai 8% di bawah 1990 tingkatan antara tahun 2008-2012,

menggambarkan sebagai masa anggaran emisi atau pancaran yang pertama. United States atau Amerika Serikat akan diperlukan untuk mengurangi emisi atau pancaran totalnya adalah suatu rata-rata dari 7% di bawah tingkatan 1990.

d. COP-4, Buenos Aires

COP-4 mengambil tempat di Buenos Aires pada bulan November 1998. Diharapkan bahwa isu yang sisanya belum terpecahkan di Kyoto akan diselesaikan pada pertemuan ini. Bagaimanapun juga, kompleksitas dan kesukaran dari menemukan persetujuan pada isu ini membuktikan tak dapat ditanggulangi, dan sebagai gantinya perkumpulan mengadopsi rencana 2 tahun " Rencana Kegiatan" untuk membantu usaha dan untuk memikirkan mekanisme untuk menerapkan Protokol Kyoto, untuk diselesaikan pada 2000.

e. COP-5, Bonn, Jerman.

Konferensi ke 5 dari perkumpulan UNFCCC berkumpul di Bonn, Jerman, antara 25 Oktober dan 5 November 1999. Merupakan suatu pertemuan yang teknis, dan tidak menjangkau kesimpulan yang utama.

f. COP-6, Hague, Belanda

Ketika Cop-6 berkonferensi pada 13 November-25 November , 2000, di Hague, Belanda, diskusi meningkat dengan cepat ke dalam suatu negosiasi yang tingkat tinggi pada isu politis utama. Ini mencakup kontroversi yang utama pada Proposal milik Amerika Serikat untuk mengijinkan kredit untuk karbon " pencemaran " di hutan dan Negara agraris , memuaskn suatu proporsi yang utama dari U.S itu. pengurangan emisi dengan cara ini; perselisihan paham dari konsekuensi untuk tidak memenuhi syarat oleh negara-negara yang tidak sepaham

dengan target pengurangan emisi mereka; dan berbagai kesulitan dalam memecahkan bagaimana negara berkembang bisa memperoleh bantuan keuangan untuk berhubungan dengan efek merugikan dari perubahan iklim dan bertemu dengan obligasi mereka untuk merencanakan untuk mengukur dan mungkin mengurangi emisi gas rumah kaca. Pada akhir COP-6, disamping kompromi beberapa setuju antara Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa, khususnya Inggris, Uni Eropa seluruhnya, yang dipimpin oleh Denmark dan Jerman, menolak posisi kompromi, dan pembicaraan di Hague. Hague Jan Pronk, Presiden dari COP-6, COP-6 yang ditunda tanpa persetujuan, dengan harapan negosiasi tersebut akan dimulai lagi. Kemudian diumumkan bahwa pertemuan COP-6 (COP-6 ke dua) akan dilanjutkan di Bonn, Jerman, pertengahan Juli. Jadwal pertemuan berikutnya telah ditetapkan bagi peserta UNFCCC-COP 7, di Marakesh, Maroko, pada Oktober-November 2010.

COP-6 "bis," (ke dua) Bonn, Jerman

Ketika hasil pertemuan dari COP-6 pada 17-27 Juli, 2001, di Bonn, Jerman, kemajuan yang sedikit telah dibuat untuk memecahkan perbedaan yang menghasilkan suatu jalan buntu di Hague. Bagaimanapun, pertemuan ini mengambil tempat setelah Presiden George W Bush telah menjadi Presiden Negara itu, dan telah menolak Protokol Kyoto pada bulan Maret; sebagai hasilnya delegasi Amerika Serikat pada pertemuan ini merosot untuk mengambil bagian dinegosiasi yang dihubungkan dengan Protokol, dan memilih untuk bertindak sebagai peninjau dalam pertemuan. Ketika peserta lain menegosiasi isu pokok, persetujuan telah dicapai dari sebagian besar isu politik utama, yang mengherankan sebagian besar peninjau yang memberikan harapan kurang pada pertemuan sebelumnya. Persetujuan mencakup:

1. Mekanisme yang fleksibel: Mekanisme "Fleksibilitas" isi dari protokol yang sangat disayangi Amerika Serikat akhirnya dijadikan satu, termasuk pertukaran emisi, *Joint Implementation*(JI), dan *Clean Development Mecanism* (CDM), yang memungkinkan Negara-negara industri untuk mendanai aktivitas pengurangan emisi pada Negara berkembang sebagai alternatif bagi pengurangan emisi domestik. Elemen utama dari persetujuan ini adalah bahwa tidak akan ada batas kuantitatif kredit Negara dapat mengklaim melalui mekanisme ini, tetapi aksi domestik harus menyusun elemen yang penting sebagai usaha dari tiap Negara Negara Annex B untuk memenuhi target mereka.
2. Pencemaran Karbon: Kredit karbon telah disetujui untuk aktivitas luas yang menyerap karbon dari atmosfer atau menyimpannya, mencakup hutan dan pengelolaan lahan, dan revegetasi, dengan tidak ada batasan atas banyaknya kredit yang dapat Negara klaim dari aktivitas pencemaran.
3. Pelaksanaan: tindakan akhir pada pelaksanaan prosedur dan mekanisme yang akan menegur pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Protokol. yang ditunda pada COP-7.
4. Pembiayaan: Tiga dana yang baru telah disetujui untuk menyediakan bantuan bagi kebutuhan sehubungan dengan perubahan iklim; dana negara berkembang yang sedikit untuk mendukung Program Adaptasi Nasional ; dan dana adaptasi Protokol Kyoto didukung oleh suatu CDM retribusi dan sumbangan sukarela.

Sejumlah detil operasional diperhatikan sekali dari keputusan ini yang tinggal dirundingkan dan disetujui, dan ini adalah isu yang utama yang mengikuti pertemuan COP-7.

g. COP-7, Marakesh, Maroko.

Pada rapat COP-7 di Marakesh, Maroko, 29 Oktober -10 November 2001, perunding pada hakekatnya menyelesaikan pekerjaan dari Rencana Kerja Buenos Aires, membereskan kebanyakan dari detil operasional dan menentukan langkah untuk negara-negara untuk mensahkan Protokol. Paket yang diselesaikan tentang keputusan dikenal sebagai *Marrakech Accords*. Delegasi Amerika Serikat tetap bertindak sebagai peninjau, kemerosotan untuk mengambil bagian di negosiasi yang aktif. Peserta lainnya tetap menyatakan harapan mereka bahwa Amerika Serikat akan memakai tenaganya lagi diproses pada beberapa titik, tetapi mereka mengindikasikan untuk mencari pengesahan dari keperluan jumlah negara-negara untuk membawa Protokol ke dalam kekuatan (55 negara-negara mewakili 55% dari emisi negara maju dari gas asam-arang di 1990). Suatu target untuk membawa Protokol ke dalam kekuatan telah dikemukakan pada: Agustus-September 2002 *World Summit on Sustainable Development* (WSSD).yang dilaksanakan di Johannesburg, Afrika Selatan.

Keputusan yang utama pada COP-7 mencakup

- Aturan operasional untuk emisi dagang internasional antara peserta Protokol dan untuk CDM dan *joint implementation*
- Rezim pelaksanaan yang menguraikan secara singkat konsekuensi bagi kegagalan temu target emisi tetapi ditangguhkan peserta Protokol setelah itu

masih mempunyai kekuatankah, untuk memutuskan apakah konsekuensi ini mengikat menurut hukum atau tidak;

- Prosedur akuntansi untuk mekanisme fleksibilitas;
- Suatu keputusan untuk mempertimbangkan pada COP-8 bagaimana cara mencapai suatu tinjauan ulang dari ketercukupan dari komitmen yang mungkin bergerak ke arah diskusi bagi komitmen masa depan negara sedang berkembang.

h. COP-8, New Delhi, India

23 Oktober – 1 November 2002

i. COP-9, Milan, Italia

1 – 12 Desember 2003

j. COP-10, Buenos Aires, Argentina

6 – 17 Desember 2004

k. COP-11, Montreal, Kanada

The *United Nations Climate Change Convention* (COP 11 atau MOP 1) Adalah pertemuan global yang mengambil tempat di gedung Palais des congrès de Montréal di Montreal, Quebec, Kanada dari tanggal 28 November sampai 9 Desember 2005.

Pertemuan konferensi yang ke 11 peserta dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), adalah pertemuan yang pertama dari pertemuan Protokol Kyoto sejak pertemuan pertama di Kyoto tahun 1997. Merupakan salah satu konferensi antar pemerintah paling

besar atas perubahan iklim yang pernah ada. Peristiwa yang menandai masuknya kekuatan Protokol Kyoto itu.

Menjadi tuan rumah lebih dari 10,000 delegasi, merupakan salah satu dari peristiwa internasional paling besar di Kanada dan pertemuan yang paling besar di Montreal sejak Expo 67.

The Montreal Action Plan adalah suatu persetujuan disiapkan pada akhir pertemuan "untuk memperluas tingkatan hidup dari Protokol Kyoto di akhir 2010 dan negosiasi lebih dalam pada pengurangan emisi gas rumah kaca.

l. COP-12, Nairobi, Kenya

Pertemuan yang kedua dari peserta Protokol Kyoto (COP/MOP 2), bersama dengan ke dua belas bagian dari Konferensi dari perubahan iklim (COP 12), telah dilaksanakan di Nairobi, Kenya dari 6 sampai 17 November 2006. Di pertemuan, wisatawan iklim adalah ungkapan untuk menguraikan beberapa delegasi yang menghadiri " melihat Afrika untuk melihat kehidupan dari anak anak dan wanita Afrika yang sekarat".

m. COP-13, Bali, Indonesia

COP-13 dan MOP-3 mengambil tempat di Nusa Dua, Bali, Indonesia, antara 3 Desember dan 15 Desember 2007. Persetujuan atas suatu negosiasi yang digaris bawahi pada kerangka 2012 (sebuah pengganti untuk Protokol Kyoto) telah dicapai. Negosiasi ini akan berlangsung selama 2008 (menuju ke COP-14 dan MOP-4 di Poznan, Polandia) dan 2009 (menuju ke arah COP-15 dan MOP-5 di Copenhagen, Denmark).

n. COP-14, Poznań, Polandia

COP-14 akan dilaksanakan di Poznan, Polandia pada 1-12 Desember 2008.

o. COP-15, Copenhagen, Denmark

COP15 akan diadakan di Copenhagen, Denmark dan akan berakhir dua minggu dari 30 November sampai 11 Desember. .

Tujuan keseluruhan dari COP-15 *United Nations Climate Change Conference* oleh Denmark adalah untuk membangun persetujuan iklim global yang ambisius periode 2012 ketika periode komitmen pertama telah usang.

B. Tujuan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)

Tujuan utama konvensi perubahan iklim seperti tercantum dalam Pasal 2 adalah untuk: *menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer pada tingkat tertentu dari kegiatan manusia yang membahayakan system iklim.*⁸ Dalam pasal tersebut tingkat konsentrasi yang hendak distabilkan tidak ditentukan, maka dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda sambil mengupayakan kemungkinan dilakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Untuk mencapai tujuan Konvensi diperlukan suatu prinsip. Beberapa prinsip dasar itu antara lain:

1. Kesetaraan (*equity*)

Iklim global dan sistem iklim dimiliki secara adil dan setara oleh semua umat manusia, termasuk generasi mendatang.

⁸ Protokol Kyoto pasal 2

2. Tanggung jawab bersama tapi berbeda (*Common but differentiated responsibilities*)

Semua Negara pihak mempunyai tanggung jawab yang sama namun dalam tingkat yang berbeda dalam hal target pengurangan emisi gas rumah kaca. Karena sampai sekarang sebagian besar emisi dihasilkan Negara maju, dan mempunyai kemampuan paling besar untuk mengurangi emisi GRK, maka mereka harus mengambil porsi tanggungjawab paling besar dalam menangani perubahan iklim. Hal ini sesuai dalam pasal 3 yang berbunyi: ... *setiap Pihak memiliki tanggungjawab umum yang sama, namun secara khusus harus dibedakan sesuai dengan kemampuannya (common but differentiated responsibilities)*.⁹ Hal ini berarti bahwa setiap Negara memiliki tanggungjawab yang lebih dengan menunjukkan kepemimpinannya dalam mencegah perubahan iklim dan mengatasi dampaknya.

3. Tindakan kehati-hatian (*Precautionary measure*)

Apabila ada ancaman kerusakan yang serius, ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan pencegahan. Dunia tidak bisa menunggu hasil kajian ilmiah yang mutlak tanpa melakukan sesuatu untuk mencegah dampak pemanasan global lebih lanjut.

4. Pembangunan Berkelanjutan

Meski secara mendasar prinsip pembangunan berkelanjutan ini masih dalam perdebatan, namun dapat digambarkan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka pula”. Semua Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan.

⁹ Protokol Kyoto pasal 3

C. Negara-negara anggota *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)

Negara-negara yang meratifikasi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) terbagi menjadi 3 kelompok:

- a. Negara-negara Annex I (negara-negara industri). Negara Annex 1 adalah negara-negara yang telah menyumbangkan pada GRK akibat kegiatan manusia sejak revolusi industri tahun 1850-an, yaitu: Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Belarusia, Belgia, Bulgaria, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Federasi Rusia, Jerman, Hongaria, Irlandia, Italia, Inggris, Islandia, Jepang, Kanada, Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Monako, Norwegia, Polandia, Portugal, Perancis, Rumania, Selandia Baru, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Uni Eropa, dan Yunani.¹⁰
- b. Negara-negara Annex II yaitu negara-negara maju yang diwajibkan menyediakan sumberdaya keuangan guna membayar biaya adaptasi yang dikeluarkan negara berkembang untuk menghadapi perubahan iklim.¹¹
- c. Negara Non- Annex 1 adalah negara-negara yang tidak termasuk dalam Annex 1, yang kontribusinya terhadap GRK jauh lebih sedikit serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah. Indonesia termasuk di dalamnya.

Negara-negara Annex I setuju untuk mengurangi emisi mereka (khususnya karbon dioksida) sesuai yang telah ditentukan pada tahun 1990. Jika

¹⁰ walhibali@gmail.com

¹¹ Protokol Kyoto pasal 4 poin 3

mereka tidak mampu melakukannya, maka mereka harus membayar beban emisi atau investasi pada usaha konservasi atau perbaikan. Negara-negara Annex II, yang menyediakan sumber daya keuangan bagi negara-negara berkembang.

D. Perkembangan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)

Berdasar pada tujuan UNFCCC itu yakni untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer di level tertentu yang dapat membahayakan manusia. Oleh karena itu, maka untuk menjalankan kegiatan UNFCCC, membentuk badan pengambilan keputusan tertinggi yaitu Pertemuan Para Pihak (*COP-Conference of the Parties*) yang mengadakan pertemuan rutin sekali setahun atau jika dibutuhkan.

Fungsi dari Pertemuan Para Pihak adalah mengkaji pelaksanaan Konvensi, memantau pelaksanaan kewajiban para Pihak sesuai tujuan Konvensi, mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi, membuat rekomendasi kepada Para Pihak, mendirikan badan-badan pendukung jika diperlukan.

Selain itu, dibentuk dua badan pendukung yaitu Badan Pendukung Untuk Nasehat Ilmiah dan Teknologi. (*SBSTA-Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice*) dan Badan Pendukung Untuk Pelaksanaan (*SBI-Subsidiary Body for Implementation*). Dua badan pendukung ini mengadakan pertemuan dua kali setahun atau ketika dibutuhkan. SBSTA memberikan informasi dan rekomendasi ilmiah serta teknologis secara tepat waktu kepada COP. SBI membantu COP mengkaji pelaksanaan dari Konvensi.

Dasar yang digunakan untuk mengurangi dampak dari Global Warming adalah Protokol Kyoto. Protokol Kyoto dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim (*Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change*) adalah kesepakatan yang mengatur upaya penurunan emisi GRK oleh negara maju, secara individu atau bersama-sama. Protokol ini disepakati pada Konferensi Para Pihak Ketiga COP III yang diselenggarakan di Kyoto pada Desember 1997.

Protokol Kyoto adalah sarana untuk mencapai tujuan Konvensi Perubahan Iklim dengan menetapkan sasaran penurunan emisi keseluruhan oleh negara industri sebesar 5% di bawah tingkat emisi 1990 dalam periode 2008-2012.

Protokol Kyoto terdiri dari 28 pasal dan dua lampiran (Annex) serta menetapkan penurunan emisi, kelembagaan, serta prosedur penataan dan penyelesaian sengketa. Annex A mencantumkan jenis GRK yang diatur protokol yaitu: karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrogen oksida (N₂O), hidro fluorokarbon (HFC), Perfluorokarbon (PFC), dan sulfur heksafluorida (SF₆), beserta sumber emisinya seperti energi, proses industri, pertanian, dan pengolahan limbah.¹²

Negara berkembang tidak diwajibkan menurunkan emisi tetapi bisa melakukannya secara sukarela dan diminta melaksanakan pembangunan industri yang lebih bersih dan lebih ramah iklim. Untuk itu, negara maju diwajibkan

¹² walhibali@gmail

memfasilitasi alih teknologi dan menyediakan dana bagi program pembangunan berkelanjutan yang ramah iklim.

Dalam Protokol Kyoto juga diatur mekanisme fleksibel:

1. Implementasi Bersama (*Joint Implementation*)

Yaitu mekanisme penurunan emisi dimana negara-negara Annex 1 dapat mengalihkan pengurangan emisi melalui proyek bersama dengan tujuan mengurangi emisi akibat kegiatan manusia atau yang meningkatkan peresapan GRK.

2. Perdagangan Emisi (*Emission Trading*)

Ini adalah mekanisme perdagangan emisi yang hanya dapat dilakukan antar negara industri untuk memudahkan mencapai target. Negara industri yang emisi GRK-nya di bawah batas yang diizinkan dapat menjual kelebihan jatah emisinya ke negara industri lain yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Namun, jumlah emisi GRK yang diperdagangkan dibatasi agar negara pembeli emisi tetap memenuhi kewajibannya.

3. Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism-CDM*)

Pasal 12 Protokol Kyoto menguraikan prosedur penurunan emisi GRK dalam rangka kerjasama negara industri dengan negara berkembang. Mekanisme ini diharapkan membantu negara Annex 1 mencapai target pengurangan emisi dan negara non Annex 1 dapat melaksanakan program pembangunan berkelanjutan. Caranya adalah negara Annex 1 melakukan investasi dalam program pengurangan emisi atau program yang berpotensi mengurangi emisi dan/atau menyerap GRK di negara berkembang. Hasilnya akan dihitung sebagai pengurangan emisi di negara Annex 1 yang melakukan investasi

tersebut. Mekanisme ini melibatkan berbagai persyaratan dan diawasi oleh sebuah badan operasioanal (*Executive Board*) yang ditunjuk COP. Dalam pelaksanaanya CDM adalah murni bisnis jual beli emisi.

Dalam pertemuan di Bali terdapat kemajuan dalam penanganan Global warming, salah satunya yang menguntungkan Indonesia adalah terakomodasinya isu penghutan kembali dalam "*Bali Roadmap*". "*Bali Roadmap*" adalah merupakan peta jalan menuju kerangka pengaturan baru perubahan iklim pasca Protokol Kyoto. Pada Protokol Kyoto tidak sepenuhnya mengakomodasi isu penghutan kembali maka sebaliknya dengan Bali Roadmap.

Masalah kehutan mendapat perhatian besar bahkan terdapat dukungan besar terhadap proyek *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (REDD). REDD adalah pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Maka ada kesepakatan perlunya mobilisasi dana untuk mendukung REDD. Kemudian isu yang juga mengalami kemajuan positif dalam pertemuan Bali adalah isu alih teknologi. Dalam isu alih teknologi, para delegasi sepakat untuk melakukan alih teknologi dan telah memperkuat badan *expert group on technology transfer (EGTT)*. Lalu, para delegasi Konferensi Internasional mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) juga telah setuju membentuk badan dana adaptasi untuk mengatur dana adaptasi dimana Indonesia berhasil menjadi anggotanya. Pada UNFCCC di Bali kemarin telah menghasilkan beberapa hal, sesuai yang dikemukakan oleh Presiden COP 13 Rahmat Witoelar. Tiga hal penting yang merupakan hasil UNFCCC yaitu, pertama, tercapainya kesepakatan dunia yang disebut Bali Roadmap.

Kedua, disepakatinya 4 agenda yaitu :

1. Aksi untuk melakukan kegiatan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim (mis. Kekeringan dan banjir).
2. Cara-cara untuk mereduksi emisi GRK
3. Cara-cara untuk mengembangkan dan memanfaatkan *climate friendly technology*
4. Pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi.

Dan kesepakatan ketiga, adanya target waktu, yaitu 2009.

Sedangkan Bali Roadmap sendiri meliputi lima hal yaitu Komitmen Pasca 2012 (*AWG on long-term cooperative action under the convention*), adaptasi/Dana Adaptasi (*Adaptation Fund*), alih Teknologi (*Technology transfer*), *REDD (Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries)* dan *CDM (Clean Development Mechanism)*

Berikut penjelasan lebih detail soal *Bali Roadmap*:

1. Komitmen Pasca 2012 (*Dialogue & AWG*)

Semua Parties menyadari diperlukannya reduksi penurunan emisi global yang lebih besar (*deeper cut*) sebesar 25-40% sebagai komitmen lanjutan dari negara maju (annex-I Protokol Kyoto) sesuai dengan AR4 IPCC. Proses penyelesaian hingga 2009 (*Ad-Hoc Working Group on Long Term Cooperative Action under the Convention*).Peningkatan aksi mitigasi perubahan iklim secara nasional internasional dalam kerangka *common but differentiated responsibilities*: Negara maju untuk komitmen membentuk rencana aksi dalam melakukan langkah menurunkan emisi GRK yang

terukur, dilaporkan dan terverifikasi. Negara berkembang melakukan mitigasi dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan melalui bantuan teknologi, peningkatan kapasitas, pendanaan, melalui cara-cara terukur, nyata dan dapat dilaporkan.

2. Dana Adaptasi

Tindakan aksi adaptasi seperti kerjasama internasional dalam kajian kerentanan, kajian kebutuhan pendanaan. Disepakatinya elemen operasional *Adaptation Fund*, yaitu: *operating entity*, fungsi, komposisi keanggotaan, quorum, pengambilan keputusan, *chairmanship*, *frequency of meetings*, *observer*, transparansi, *secretariat*, *trustee*, *monetization*, *access to funding*, pengaturan institusi, dan review. Badan Dana Adaptasi (*Adaptation Fund Board*) sebagai *operating entity*, GEF sebagai Sekretariat dan *trustee* oleh World Bank.

Perwakilan Indonesia (Mahendra Siregar) disetujui sebagai *Chairman of Adaptation Fund Board*. Pendanaan adaptasi bersumber dari 2% hasil penjualan *CER (certified emissions reduction)* dari proyek CDM yang memiliki dana Euro 37 juta (akan meningkat 80-300 juta USD periode 2008-2012).

3. Transfer Teknologi

Peningkatan tindakan pengembangan teknologi dan transfer pada dukungan aksi mitigasi dan adaptasi (Peningkatan dari tingkat pembahasan teknis hingga implementasi).Mempercepat jalan penyebaran, penggunaan dan transfer teknologi yang ramah lingkungan. Peningkatan aksi pada penyediaan

sumber keuangan dan dukungan investasi pada tindakan mitigasi dan adaptasi serta kerjasama teknologi. Memperkuat akses pendanaan bagi negara berkembang GEF sebagai *operational entity* untuk penerapan Convention akan menyiapkan "*a strategic program*" untuk peningkatan *development, deployment, diffusion* teknologi.

4. *Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries (REDD)*

Semua Negara pihak menyepakati bahwa langkah nyata dalam mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan merupakan kepentingan mendesak. Program kerja telah ditetapkan dan difokuskan pada, misalnya, kajian perubahan tutupan lahan dan emisi GRK, metode untuk mendemonstrasikan pengurangan emisi dari deforestasi. Hal ini penting untuk mengangkat kebutuhan komunitas lokal dan warga asli. Persetujuan dilakukannya *demonstration activities* degradasi, deforestasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dimasukkan dalam mekanisme *REDD National dan Sub-National baselines*

5. *Clean Development Mechanism (CDM)*

Distribusi pelaksanaan CDM sampai level *sub-regional* *.Programmatic of activity* sudah dapat diusulkan ke *Executive Board* *.Perubahan Skala AR CDM* dari 8 kton menjadi 16 kton yang dilakukan oleh masyarakat berpendapatan rendah, dengan kriteria *low income communities* ditentukan oleh negara tuan rumah. Langkah ini akan memperluas jumlah proyek dan distribusi proyek di Negara-negara yang sebelumnya tidak dapat ikut serta dalam kategori proyek ini. *Carbon Capture and Storage* Negara

pihak mempertimbangkan dimasukkannya CCS-formasi geologi ke dalam proyek CDM. Mereka menyepakati untuk meneruskan kajian lebih jauh dan menyusun rencana kerja tahun 2008 (teknis, legal, kebijakan dan aspek pendanaan). CCS secara luas diakui sebagai teknologi penting untuk melanjutkan penggunaan bahan bakar minyak yang “bersih” .*LDC, Least Developed Countries* negara pihak menyetujui untuk memperpanjang mandat *LDC’s Expert Group*. Group ini memberikan saran mengenai kajian adaptasi yang diperlukan LDC, mengingat kebutuhan adaptasi di LDC harus didukung karena kapasitas yang rendah dalam beradaptasi.¹³

¹³ Dikutip dari detikcom tanggal 19/12/2007

BAB III

INDONESIA DAN UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC) DI BALI

Dalam kancah hubungan internasional kerjasama antar negara atau pun dengan organisasi internasional tentu tidak dapat dielakkan. Karena dengan melakukan kerjasama dengan negara lain akan memberikan banyak keuntungan bagi negara tersebut untuk kemajuan negara tersebut pula.

Indonesia dalam rangka memajukan negaranya telah ikut dalam organisasi-organisasi internasional serta bekerja sama dengan negara-negara di dunia. Dalam tulisan ini Indonesia dengan menjadi anggota PBB melalui ajang UNFCCC Indonesia bersedia menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan UNFCCC di Bali. Ini berarti Indonesia telah melakukan politik luar negeri aktif.

Bagi Indonesia ajang UNFCCC yang digelar di Bali memberikan banyak keuntungan selain itu Indonesia dengan kesediaannya menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan UNFCCC mempunyai kepentingan. Konferensi ini tentu akan memberikan banyak hal bagi Indonesia

A. Politik Luar Negeri R. I. Atas Penyelenggaraan UNFCCC di Bali

Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tegaknya NKRI yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional

dari Sabang sampai Merauke sangat perlu untuk dipelihara. Namun mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, dimana terdiri lebih dari 17.500 pulau, memiliki posisi yang sangat strategis di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dengan posisi strategis tersebut, maka berbagai negara khususnya negara-negara besar memiliki kepentingan terhadap kondisi stabilitas keamanan di Indonesia. Implikasi dari kepentingan negara lain tersebut menimbulkan kecenderungan campur tangan atau kepedulian yang tinggi dari negara-negara tersebut terhadap kemungkinan gangguan stabilitas keamanan Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kepentingan nasional tersebut diaktualisasikan salah satunya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Polugri ini dituangkan kedalam program kerja kabinet, dan pada saat ini, kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2005 merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Kabinet Indonesia bersatu (2004-2009), yang konsisten diabdikan bagi kepentingan nasional.

Pencapaian kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis baik dalam tataran global maupun regional yang memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi proses

pencapaian kepentingan tersebut. Dan dalam rangka menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah dengan cepatnya, semakin disadari perlunya untuk mengembangkan kelenturan dan keluwesan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri agar dapat memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang yang muncul dari perubahan lingkungan strategis secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kuncinya pada bulan Mei 2005 telah memperkenalkan suatu konsep baru yaitu kebijakan luar negeri “konstruktivis”, yang pada intinya dimaksudkan untuk mengembangkan tiga macam kondisi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu: (1) pola pikir positif dalam mengelola kerumitan permasalahan luar negeri; (2) konektivitas yang sehat dalam urusan-urusan internasional; dan (3) identitas internasional yang solid bagi Indonesia yang didasarkan pada pencapaian-pencapaian domestik dan diplomatiknya. Diplomasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) turut mengaktualisasikan program dan prioritas Kabinet Indonesia Bersatu yang pada intinya adalah melakukan diplomasi total untuk ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu, lebih aman damai, adil, demokratis dan sejahtera.

Penerapan politik luar negeri bebas - aktif tersebut juga harus disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global maupun regional yang sangat mempengaruhi penekanan kebijakan luar negeri Indonesia. Polugri Indonesia didesain untuk mampu mempertemukan kepentingan nasional Indonesia dengan lingkungan internasional yang selalu berubah. Tidak dapat dipungkiri perlunya polugri yang luwes dan flexible untuk menghadapi segala

tantangan dimaksud. Perubahan lingkungan internasional tersebut tidak hanya disebabkan oleh dinamika hubungan antar negara tetapi juga perubahan isu, dan munculnya aktor baru dalam hubungan internasional yang berupa *non-state actors*.

Fenomena saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas. Demikian pula, saling keterkaitan antar masalah juga terlihat dari pembahasan topik-topik global pada agenda internasional yang cenderung membahas isu-isu yang menyangkut hak asasi manusia (HAM), intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, “*good governance*” dan anti-korupsi, lingkungan hidup, masalah tenaga kerja, kejahatan transnasional seperti terorisme dll. Fenomena tersebut di atas diikuti pula oleh fenomena globalisasi yang semakin meluas, dimana globalisasi merupakan arus kekuatan yang dampaknya tidak dapat dielakkan oleh negara manapun di dunia. Globalisasi telah membawa berbagai peluang besar bagi kemajuan perekonomian negara-negara yang dapat memanfaatkannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi pada kenyataannya juga memiliki dampak yang merugikan, khususnya bagi negara-negara yang belum atau kurang mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Kepentingan nasional Indonesia diterjemahkan kedalam visi Departemen luar negeri yang disebut sebagai “*Sapta Dharma Caraka*”, yaitu: (1) Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan

kedaulatan Indonesia; (2) membantu pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerja sama pembangunan dan ekonomi, promosi dagang dan investasi, kesempatan kerja dan alih teknologi; (3) meningkatkan peranan dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN, peran aktif di Asia-Pasifik, membangun kemitraan strategis baru Asia-Afrika serta hubungan antar sesama negara berkembang; (4) memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme; (5) meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati hak asasi manusia, dan memajukan perdamaian dunia; (6) meningkatkan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri serta melancarkan diplomasi kemanusiaan guna mendukung tanggap darurat dan rekonstruksi Aceh dan Nias dari bencana gempa dan tsunami; (7) melanjutkan benah diri untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, budaya kerja dan profesionalisme pelaku diplomasi serta peranan utama dalam koordinasi penyelenggaraan kebijakan dan hubungan luar negeri.¹⁴

Seperti yang telah ditekankan, bahwa politik luar negeri Indonesia dirumuskan untuk memperjuangkan suatu kepentingan melalui hubungan atau kerjasama dengan bangsa-bangsa di dunia. Kepentingan tersebut dapat bersifat global, regional dan nasional.

¹⁴ www.deplu.go.id

Untuk mencapai kepentingan Indonesia berkaitan dengan iklim, pemerintah melalui Departemen Lingkungan Hidup sebagai pelaksananya adalah Kementerian lingkungan hidup mempunyai beberapa program yang berkaitan dengan perubahan iklim diantaranya perlindungan ozon, langit biru, menuju Indonesia hijau, dan masih banyak lagi lainnya.

Isu perubahan iklim yang sesungguhnya bukan merupakan isu baru, telah mencuat menjadi isu global yang menonjol pada tahun 2007. Laporan IPCC dan laporan Nicholas Stern telah memberikan urgensi bagi upaya penanganan yang nyata dan segera untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Konferensi ke-13. Negara-negara Pihak UNFCCC dan Pertemuan ke-3 Negara-negara Pihak pada Protokol Kyoto menjadi tumpuan harapan bagi keberhasilan proses sampai dengan tahun 2009 guna menyiapkan kerangka komitmen baru yang akan menggantikan Protokol Kyoto pada tahun 2012.

Konferensi Bali sesungguhnya merupakan bagian dari rangkaian pertemuan sebelumnya yakni Montreal dan Nairobi, dan kemudian sesudah Bali, Polandia dan Denmark. Tetapi, rangkaian pertemuan tingkat tinggi seperti *EU Summit*, G8, APEC, *High Level Meeting SMU-PBB* serta *ASEAN/East Asia Summit* telah memberikan bobot politik dan ekspektasi yang besar agar Konferensi Bali dapat menghasilkan *Bali Road Map* yang memetakan prosedur dan mekanisme serta panduan substansi bagi guliran proses selanjutnya sampai dengan 2009.

Masalah perubahan iklim bukanlah masalah teknis lingkungan hidup semata, tetapi masalah yang sarat dengan aspek politik dan ekonomi. Karena itu,

perundingan di Bali merupakan perundingan yang tidak mudah. Kepemimpinan Indonesia telah berhasil melahirkan *Bali Road Map* yang merupakan suatu terobosan bagi kebuntuan yang sebelumnya terjadi dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Konferensi Bali tentang perubahan iklim merupakan salah satu puncak tampilan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia. Bahkan tampilan Indonesia selaku tuan rumah Konferensi Bali telah menonjol pada rangkaian *summit* sebelum Bali. Inisiatif Indonesia mengenai hutan tropis (F-11 dan REDD) dan *Corral Triangle* juga telah mendapat tempat dalam Konferensi Bali dan karena itu masih akan ada tindak lanjutnya sebagai bagian dari upaya mitigasi terhadap perubahan iklim.

Isu utama yang harus ditangani dalam mengantisipasi perubahan iklim global adalah bagaimana agar sistem iklim bumi tidak terganggu dan terus memburuk. Para wakil pemerintah berbagai negara lalu membentuk sebuah panel untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan awal tentang isu ini. Setelah melalui proses yang panjang, kerangka PBB tentang Konvensi Perubahan Iklim (*UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC*) akhirnya diterima secara universal sebagai komitmen politik internasional tentang perubahan iklim pada KTT Bumi tentang Lingkungan dan Pembangunan (*UN Conference on Environment and Development, UNCED*) di Rio de Janeiro, Brasil, 1992.

Konvensi ini merupakan pilihan dan langkah yang tepat meskipun serba sulit. Oleh karena itu, di dalamnya banyak masalah berat dan serius, misalnya apakah suatu ketentuan harus mengikat secara hukum (*legally binding*) atau tidak, ditangani secara ringan dan kurang tegas. Inilah harga yang harus dibayar

dalam suatu diplomasi dan negosiasi internasional, kompromi untuk menghindari konflik yang membubarkan tujuan besar secara keseluruhan.

Bagian terpenting yang dicapai dalam pertemuan-pertemuan pendahuluan sehingga tercapai Konvensi adalah digariskannya tujuan dan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh setiap Pihak serta kewajiban Para Pihak. Di samping itu Konvensi juga menggariskan prosedur dan kelembagaan sehingga memungkinkan diselenggarakannya kegiatan politik dan diplomatik dalam berbagai pertemuan atau konferensi di bawah konvensi.

Adapun pasal-pasal yang terdapat di dalam Konvensi Perubahan Iklim adalah sebagai berikut:

Preamble

1. Definisi
2. Tujuan
3. Prinsip
4. Komitmen
5. Riset dan Pengamatan Sistematis
6. Pendidikan, Pelatihan, dan Kesadaran Publik
7. Konferensi Para Pihak
8. Sekretariat
9. Badan Pembantu untuk Saran Ilmiah dan Teknologi (SBSTA)
10. Badan Pembantu untuk Implementasi (SBI)
11. Mekanisme Keuangan
12. Komunikasi informasi yang berhubungan dengan implementasi

13. Penyelesaian Masalah Implementasi
14. Penyelesaian Sengketa
15. Amandemen Konvensi
16. Adopsi dan Amandemen Lampiran
17. Protokol
18. Hak Suara
19. Depositori
20. Tandatanganan
21. Peraturan Peralihan
22. Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan atau Akses
23. Efektivitas
24. Reservasi
25. Pengunduran Diri
26. Naskah Asli

Di samping kewajibannya untuk ikut menyelamatkan dunia dari dampak lingkungan, Indonesia harus pula berjuang untuk tidak dirugikan dalam konferensi tersebut. Karena itu, Indonesia harus mempersiapkan diri berupa usaha ke luar untuk menghadapi dunia internasional dan ke dalam untuk mengusahakan dapat terlaksananya usaha-usaha yang dapat menghindarinya atau paling sedikit mengurangi resiko terjadinya masalah lingkungan yang dikhawatirkan. Persiapan itu mencakup bidang kehutanan khususnya masalah “*deforestation*” dan keanekaragaman hayati, serta emisi gas rumah kaca. masalah emisi gas rumah kaca berkaitan erat pula dengan konsumsi energi. Haruslah

disadari bahwa dalam perdebatan tentang masalah global itu tidak sepenuhnya terdapat obyektivitas, melainkan masing-masing negara mempunyai bias dan subyektivitas yang diwarnai oleh sudut pandangnya. Haruslah pula diakui adanya masalah lingkungan yang cukup berat di tanah air kita yang dapat mengancam pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Karena masalah tersebut adalah masalah global sehingga tidak ada satu negara pun yang dapat melepaskan diri dari masalah itu. Apalagi karena masalah lingkungan global itu telah menjadi pula permasalahan politik internasional dengan pemain utamanya negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara anggota Masyarakat Eropa. Karena hingga kini fokus perhatian adalah pada hutan tropik, dampak konvensi itu dapat diperkirakan akan mempunyai dampak yang penting terhadap ekonomi dan pembangunan kita.

Pada lain pihak masalah lingkungan global itu secara langsung juga akan mempunyai dampak terhadap kehidupan dan kesejahteraan kita sehingga kita juga harus memikirkan tindakan apa yang perlu diambil, baik bersifat *preventif* atau kuratif. Masalah lingkungan dan pembangunan merupakan masalah yang luas dan rumit serta bersifat lintas sektoral. Boleh dikata semua bidang terkait padanya, antara lain: iklim, geologi, kelautan, biologi, pertanian, peternakan, kehutanan, pertambangan, ekonomi (makro dan mikro) dan sosial budaya.

B. Penyelenggaraan UNFCCC di Bali

Konferensi Perubahan iklim PBB 2007 diselenggarakan di *Bali International Convention Center (BICC)*, Hot Westin Resort, Nusa Dua Bali,

Indonesia mulai tanggal 3 Desember-15 Desember 2007 untuk membahas dampak pemanasan global. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan untuk mendiskusikan persiapan negara-negara di dunia untuk mengurangi efek gas rumah kaca setelah Protokol Kyoto kadaluarsa pada tahun 2012.

Konferensi yang diadakan oleh badan PBB *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) ini merupakan pertemuan yang ke-13 dan diikuti oleh sekitar sembilan ribu peserta dari 189 negara. Selain itu ada sekitar tiga ratus LSM internasional yang terlibat. Konferensi internasional ini diliput oleh lebih dari tiga ratus media internasional dengan jumlah wartawan lebih dari seribu orang.

Konferensi ini digelar sebagai upaya lanjutan untuk menemukan solusi pengurangan efek gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Selain itu, pembicaraan juga akan membahas mengenai cara membantu negara-negara miskin dalam mengatasi pemanasan dunia.

Konferensi kali ini mendapat tekanan untuk segera dapat mencari persetujuan global baru untuk memotong tingkat gas rumah kaca yang terus bertambah. Saat ini dari negara-negara maju emiten karbon utama di dunia yang menolak menjadi bagian dari Protokol Kyoto, hanya Australia dan AS yang menolak menandatangani Protokol Kyoto, namun dalam konferensi kali ini Australia berjanji akan meratifikasi Protokol Kyoto, sehingga hanya tinggal AS yang menolak meratifikasi.

Indonesia menjadi tuan rumah ke 13 Negara Pihak dari konvensi kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim (UNFCCC). Mempunyai tujuh

agenda: adaptasi, mitigasi, CDM (*clean development mechanism*), mekanisme finansial, pengembangan teknologi dan kapasitas, pengurangan deforestasi (perusakan hutan), serta pasca 2012 atau pasca Protokol Kyoto¹⁵. Perlunya adaptasi mengenai perubahan iklim terhadap tiap-tiap warga dari negara yang mengikuti konferensi tersebut, setelah itu baru diadakan mitigasi yang merupakan respons ataupun penanggulangan pada masalah perubahan iklim ini. Sedang pembicaraan mengenai pengembangan teknologi dan kapasitas, adalah agar negara-negara maju yang dapat menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dapat mentransfer teknologi tersebut kepada negara berkembang lainnya.

Konferensi di Bali banyak menghasilkan terobosan, baik untuk lingkungan dunia global maupun untuk Indonesia. Hal utama yang disepakati adalah pengurangan emisi harus *measurable, reportable dan verifiable* (dapat diukur, dilaporkan dan diuji) secara nasional.

Terobosan yang penting adalah semua negara menyepakati adanya pengurangan emisi melalui mitigasi yang dapat diukur, *reportable*, dan *verifiable* secara nasional. Negara berkembang melakukan pembangunannya perlu juga didukung oleh teknologi, keuangan dan kapasitas yang terukur. Semua esensinya tercantum dalam *Bali Road Map*. Transfer teknologi juga perlu diimplementasikan tidak hanya sebatas wacana saja. Selain itu dana adaptasi menjadi hasil yang disetujui. Sebelumnya dana ini dikelola dibawah suatu council yang pengambil keputusannya ditentukan oleh pemilik modal terbesar.

¹⁵ Editor review dari laporan IPCC/intergovernmental panel on climate change WG2 Daniel Murdyarso

Tetapi, negara-negara berkembang meminta dana tersebut untuk dikelola secara *independent* dengan sistem pengambilan keputusan *one country one vote*. Uangnya berasal dari CDM (*Clean Development Mechanism*), yaitu uang yang dimiliki oleh negara berkembang.

Konsep REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Degradation*) pertama kali digagas oleh Costa Rika, Papua Nugini dan beberapa lainnya yang kemudian membentuk koalisi *Tropical Rain Forest*, Indonesia baru belakangan bergabung. Konsep awalnya, hutan hanya dilihat sebagai penyerap karbon. Tapi Indonesia memiliki konsep tidak hanya itu, tapi juga untuk mencegah deforestasi dan degradasi sebagai akibat dari *illegal logging*. Indonesia juga menambahkan unsur konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah cara pemanfaatan sumber daya alam, yaitu pemanfaatan secara bijaksana atas sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian dan kemampuan daya dukungnya.¹⁶ Pemanfaatan tersebut dibarengi dengan upaya-upaya perlindungan dan pelestariannya.

Tiga hal penting yang merupakan hasil UNFCCC yaitu, pertama, tercapainya kesepakatan dunia yang disebut *Bali Roadmap*.

Kedua, disepakatinya 4 agenda yaitu :

1. Aksi untuk melakukan kegiatan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim (mis. Kekeringan dan banjir).
2. Cara-cara untuk mereduksi emisi GRK
3. Cara-cara untuk mengembangkan dan memanfaatkan *climate friendly technology*
4. Pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi.

¹⁶ Rakhmat Bowo Suharto.*op.cit.* hal. 75

Dan kesepakatan ketiga, adanya target waktu, yaitu 2009.

Sedangkan *Bali Roadmap* sendiri meliputi lima hal yaitu Komitmen Pasca 2012 (*AWG on long-term cooperative action under the convention*), adaptasi/Dana Adaptasi (*Adaptation Fund*), alih Teknologi (*Technology transfer*), REDD (*Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries*) dan CDM (*Clean Development Mechanism*)

C. Prospek Indonesia dalam UNFCCC

Keikutsertaan Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto datang karena keprihatinan Indonesia terhadap lingkungan global, khususnya pemanasan global. Dalam keikutsertaannya dalam konferensi perubahan iklim di Bali yang telah lalu, Indonesia selain melaksanakan politik luar negeri aktifnya juga mempunyai beberapa kepentingan tentunya.

Pada penyelenggaraan konferensi perubahan iklim yang lalu, Indonesia menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan konferensi tersebut. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan yang lebih bagi Indonesia khususnya.

Dengan ikut serta dalam konferensi perubahan iklim, Indonesia dapat membantu mengatasi dampak dari perubahan iklim itu dengan sistem perdagangan emisi (*tradeable emission permit*) yang memperbolehkan negara berkembang menjual emisi yang masih rendah kepada negara maju yang kelebihan emisi.

Sistem perdagangan emisi ini dapat ditempuh dengan mekanisme tertentu yang memungkinkan kerjasama yang dapat saling menguntungkan antara negara maju dengan negara berkembang.

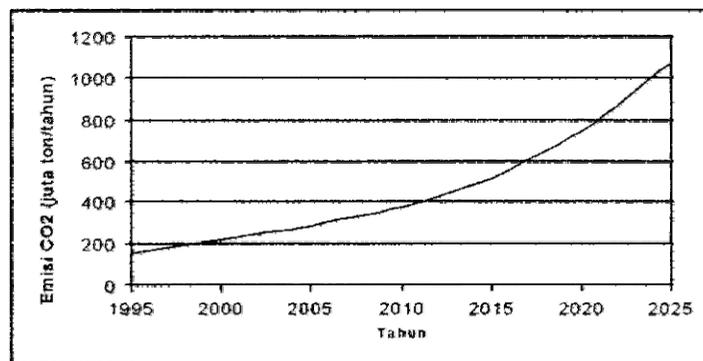
Selain itu penggunaan energi fosil akan menghasilkan emisi seperti: partikel, SO₂, Nox, dan CO₂. Emisi partikel SO₂, dan NO_x adalah bahan polutan yang berhubungan langsung dengan kesehatan manusia. Disamping itu, masyarakat internasional juga menaruh perhatian terhadap lingkungan global seperti terjadinya pemanasan global. Emisi CO₂ merupakan sumber terbesar yang bertanggung jawab terhadap terjadinya pemanasan global. Emisi CO₂ tidak berhubungan langsung dengan kesehatan. Pengaruh partikel emisi terhadap kesehatan dan lingkungan secara ringkas dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 3. 1 Pengaruh Partikel Emisi terhadap Kesehatan dan Lingkungan (Princiotta, 1991)

Emisi	Pengaruh terhadap kesehatan	Pengaruh terhadap lingkungan
SO ₂	<ul style="list-style-type: none"> - Problem saluran pernapasan - Radang paru-paru menahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Hujan asam yang dapat merusak lingkungan danau, sungai dan hutan - Mengganggu jarak pandang
NO ₂	<ul style="list-style-type: none"> - Sakit pada saluran pernapasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hujan asam - Ozon menipis yang mengakibatkan kerusakan hutan
Partikel/ debu	<ul style="list-style-type: none"> - Iritasi pada mata dan tenggorokan - Bronkitis dan kerusakan saluran pernapasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu jarak pandang
CO ₂	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak berpengaruh secara langsung 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanasan global - Merusak ekosistem

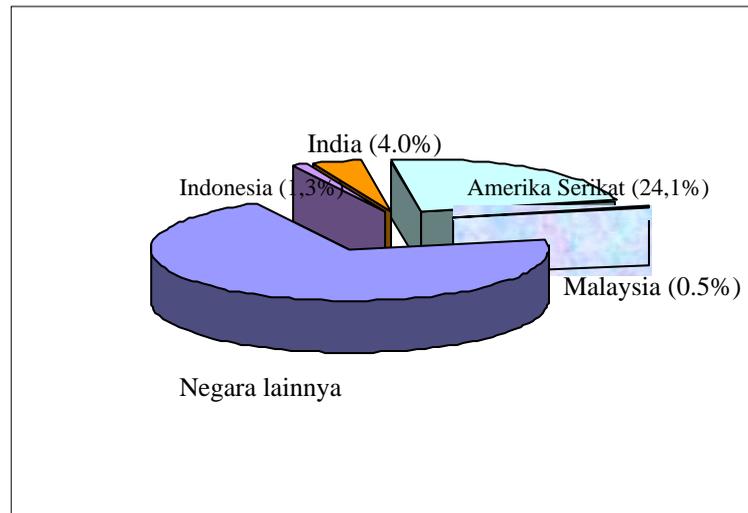
Berdasarkan hasil proyek penggunaan energi dapat dibuat proyeksi emisi CO₂ berdasarkan tatapan emisi yang dikeluarkan oleh IPCC (*intergovernmental panel on Climate Change*). Pada gambar 2. ditunjukkan proyeksi CO₂ karena penggunaan energi di Indonesia selama kurun waktu 1995-2025. Pada tahun 1995 total emisi CO₂ sebesar 156 juta ton per tahun dan meningkat 1.077 juta ton per tahun 2025 atau meningkat rata-rata sebesar 6,6% pertahun dalam kurun waktu 30 tahun.

Gambar 3.1 Proyeksi Emisi CO₂



Berdasarkan *World Development Report 1998/1999* dari Bank Dunia, total emisi CO₂ dunia pada tahun 1995, baik berasal dari penggunaan energi maupun dari sumber lain sebesar 22.700 juta ton. Negara yang mempunyai Emisi CO₂ terbesar adalah Amerika Serikat yaitu sebesar 5.468 juta ton atau sebesar 24,1% dari total emisi CO₂ dunia, sedangkan Indonesia mempunyai emisi sebesar 296 juta ton atau sebesar 1,3% dari total emisi CO₂ dunia. Pada Gambar 3. ditampilkan emisi CO₂ dan negara-negara yang dipilih. Meskipun Indonesia belum mempunyai kewajiban untuk mengurangi emisi CO₂ ini, namun sebagai anggota masyarakat global, Indonesia turut serta berinisiatif melakukan studi dan membuat strategi untuk menguranginya.

Gambar 3.2 Emisi CO₂ dari Negara-negara yang dipilih (1995)



Tabel 3.2
Gas Rumah Kaca dan Potensi Pemanasan Global

Nama	Rumus Kimia	GWP untuk 100 tahun
Carbon dioxide	CO ₂	1
Methane	CH ₄	21
Nitrous oxide	N ₂ O	310
Perfluoromethane	CF ₄	6500
Perfluorobutane	C ₂ F ₆	9200
Perfluorobutane	C ₄ F ₁₀	7000
Sulphur Hexafluoride	SF ₆	23900
HFC-23	CHF ₃	11700
HFC-32	CH ₂ F ₂	650
HFC-43-10	C ₅ H ₂ F ₁₀	1300
HFC-125	C ₂ HF ₅	2800
HFC-134a	CH ₂ FCF ₃	1300
HFC-143a	C ₂ H ₃ F ₃	3800
HFC-152a	C ₂ H ₄ F ₂	140
HFC-227ea	C ₂ HG ₇	2900
HFC-236fa	C ₃ H ₂ F ₆	6300
HFC-245ca	C ₃ H ₃ F ₅	560

Pada tahun 1992, PBB mendirikan *Framework Convention on Climate Change* (yang disingkat UNFCCC) yang merupakan insitusi internasional untuk menangani masalah pemanasan global. Pada saat itu ditandatangani kesepakatan

antara 74 negara untuk melaporkan kondisi emisi GRK di negara masing-masing. Negara maju (*Annex I Countries*) berkewajiban untuk mengukur dan membuat kebijakan dan langkah-langkah untuk mengurangi emisi GRK pada level tahun 1990. Sedangkan negara berkembang (*Non Annex I Countries*) hanya berkewajiban melakukan inventori dan melaporkan ke UNFCCC. Meskipun demikian pada saat itu kesepakatan hanya bersifat sukarela untuk mengurangi emisi belum ada sanksi bagi yang melanggarnya.

Rapat tahunan COP (*Conference of the Party*) III di Kyoto pada tahun 1997 yang diadakan oleh UNFCCC mengeluarkan *Kyoto Protocol* yang mengharuskan negara maju untuk mengurangi emisi GRK sebesar 5% dari level tahun 1990 pada periode 2008 sampai 2012. Dengan keputusan ini banyak negara maju diperkirakan tidak akan bisa memenuhi target untuk mengurangi emisi di negaranya. Oleh karena itu muncul mekanisme perdagangan emisi yang memperbolehkan negara maju (yang mempunyai emisi tinggi) bekerjasama dengan negara berkembang (yang mempunyai emisi rendah) untuk memenuhi target tersebut.

Mekanisme Perdagangan Emisi

Kyoto Protocol membuat suatu terobosan untuk membantu negara maju dalam mengurangi emisi GRK dengan menggunakan mekanisme yang sering disebut *flexibbel mechanism*. Mekanisme tersebut adalah:

1. *Joint implementation (JI)* yang merupakan bilateral antara dua institusi untuk menjalankan proyek mitigasi emisi GRK. Proyek dalam JI hanya dapat dilakukan antar negara maju dan salah satu proyek percontohan adalah *Activities Implemented Joinly (AIJ)*.

2. *International Emission Trading (IET)* yang mengacu pada pertukaran kredit emisi atau bebas emisi yang diijinkan antar negara maju dan baru bisa dilakukan setelah tahun 2008. IET mempunyai implikasi bahwa yang bisa ditukarkan adalah total emisi GRK yang dapat dikurangi untuk satu negara dengan satu negara lainnya.
3. *Clean Development Mechanism (CDM)* yang merupakan proyek kerjasama antara negara maju yang akan mengurangi emisi GRKnya dengan negara berkembang. Baik institusi swasta maupun publik di suatu negara dapat menggunakan mekanisme ini. Bila dibandingkan dengan dua mekanisme sebelumnya maka CDM merupakan alternatif yang dapat digunakan oleh negara berkembang untuk mendapatkan manfaat dari adanya pemanasan global.

Inventori dan Mitigasi

Indonesia secara berkala melaporkan inventori emisi GRK kepada UNFCCC. Yang berkewajiban membuat inventori adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan sudah mengirimkan laporannya berjudul *First National Communication of Republic of Indonesia for 1990-1994*. Emisi CO₂ yang merupakan bagian terbesar dari emisi GRK di Indonesia dengan pangsa sebesar hampir 70% sedangkan gas lainnya sebesar 30%. Pada tahun 1994 total emisi GRK sekitar 470 juta ton ekuivalen CO₂. sumber utama emisi GRK adalah sektor energi dan sektor kehutanan. Sektor energi mempunyai pangsa pasar sebesar 46% dari total emisi GRK yang berasal dari penggunaan bahan bakar fosil pada bermacam-macam aktivitas seperti: produksi energi, pengolahan energi dan juga pembakaran energi yang digunakan baik untuk

pembangkit listrik maupun untuk keperluan industri lainnya. Besarnya emisi GRK ini tergantung dari jenis energi yang digunakan, misalnya penggunaan minyak bumi berbeda emisinya dengan penggunaan gas alam maupun batubara.

Mitigasi dikembangkan untuk memperoleh level emisi tertentu dengan menambahkan teknologi pada peralatan tertentu. Teknologi untuk mitigasi GRK dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu: untuk sisi penawaran dan untuk sisi permintaan. Untuk sisi penawaran dapat dilakukan dengan menggunakan sistem konversi yang lebih efisien, mengubah bahan bakar dan energi yang mempunyai emisi tinggi menjadi energi yang mempunyai emisi rendah dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Untuk sisi permintaan dapat menggunakan *demand side management*, dan menggunakan peralatan yang lebih efisien seperti lampu TL.

Energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi mempunyai kelebihan sebagai pilihan untuk mitigasi GRK. Energi ini dapat membangkitkan listrik tanpa melalui pembakaran seperti pada penggunaan energi fosil. Pembangkit listrik tenaga air dapat dikatakan bebas dari emisi GRK, sedangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya menghasilkan seperenam dari emisi GRK yang dihasilkan dari penggunaan gas alam untuk pembangkit listrik.

Biaya Pengurangan Emisi

Perkiraan biaya untuk mengurangi emisi GRK (*abatement cost biaya pengurangan emisi*) bervariasi tergantung dari lokasi spesifik, tingkat perekonomian, penguasaan teknologi, dan teknik dalam menghitung emisi. Biaya diperkirakan berkisar antara 20 sampai 150 dolar Amerika (US\$) per ton Carbon (tC) yang

dikurangi (Cooper, 2000). Di negara berkembang biaya pengurangan emisi lebih rendah bila dibandingkan dengan negara maju. Sehingga memungkinkan negara maju untuk melakukan pengurangan emisi dengan berinvestasi di negara berkembang melalui CDM.

Tabel 3.3 Biaya Pengurangan Emisi CO₂

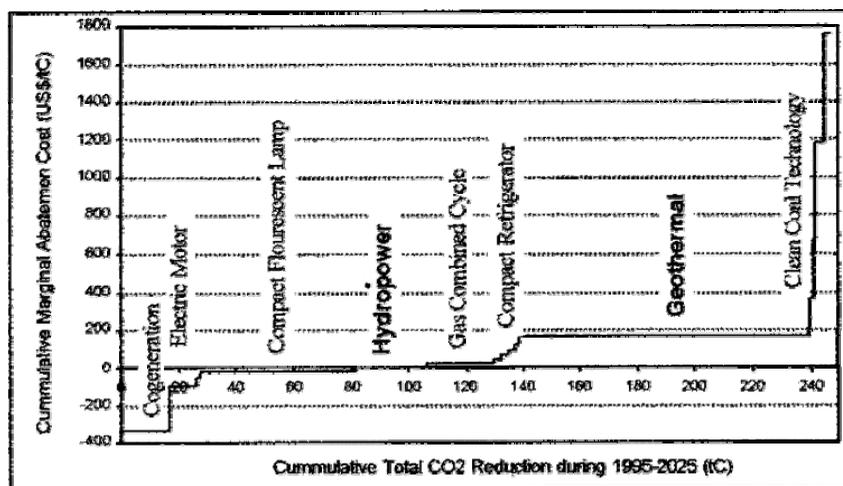
Mitigation Options	CO ₂ reductio	Additional cost	Abatement cost
	10 ⁶ tC ²⁾	10 ⁶ US\$ ³⁾	US\$/tC
Baseline	3,397.3	454,260	-
Cogeneration	16.6	-3,939	-236,8
New motor electric	9.5	-398,8	-41.8
Solar thermal	0.8	-34	-41.6
Compact flour lamp	54.0	-571	-10.6
Improve refrigerator	3.5	-8	-2.3
HiTech refrigerator	4.3	-6.6	-1.5
New Mini Hydro PP	7.9	6.0	0.8
New Hydro PP	9.2	72.2	7.8
New Gas C.Cycle PP	1.9	19.0	10.0
Adv Compct F.Lamp	22.0	224.5	10.2
Compact Refrigerator	2.7	47.1	17.3
Compact Panel Refrig	2.1	48.9	22.4
New Biomass PP	2.4	62.3	25.4
Mitigation Options	CO₂ reductio	Additional cost	Abatement cost
New Gas Turbine PP	1.0	29.4	27.0
Geotherman PP	100.9	4,429	43.9
New HSD Gas Turbine	1.0	212.4	194.7
New Coal PP 600 MW	1.0	349.2	320.1
New Coal PP 4000 MW	3.0	1,512	504.0
Standar Flour Lamp	1.9	1,088	569.9

Biaya pengurangan emisi di Indonesia yang dihitung berdasarkan model MARKAL ditampilkan pada tabel 3. Pembangkit listrik tenaga air dapat mengurangi emisicO₂ sekitar 17,1 juta tC sepanjang periode 1995-2025 dengan biaya pengurangan emisi berkisar antara 0.8-7.8 US4/tC. Sedangkan panas bumi dapat mengurangi emisi CO₂ sekitar 100,9 juta tC dengan biaya sekitar 43,9 US\$/tC. Bila dibandingkan dengan biaya secara internasional maka biaya di Indonesia masih

sangat murah sehingga memungkinkan Indonesia untuk memperoleh keuntungan dari dampak pemanasan global ini. Negara-negara maju dapat memberikan tambahan investasi untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia, sementara mereka akan mendapatkan keuntungan karena besar pengurangan emisinya dihitung sebagai pengurangan emisi di negara maju yang bersangkutan.

Biaya pengurangan emisi biasanya ditampilkan dalam bentuk Kurva CERI (*Cost of emission reduction initiative*). Kurva CERI menampilkan biaya untuk mitigasi emisi CO₂ pada sumbu Y dan emisi CO₂ yang dapat dikurangi pada sumbu X seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Dengan menggunakan kurva ini maka akan lebih mudah mengetahui besar kecilnya CO₂ yang dapat dikurangi pada biaya pengurangan emisi tertentu untuk masing-masing teknologi. Dari Gambar 3 terlihat bahwa yang berpotensi untuk mengurangi emisi CO₂ pada ada tiga yaitu penggunaan lampu TL, pembangkit listrik tenaga air dan geothermal. Penggunaan lampu TL merupakan sisi permintaan yang banyak berhubungan dengan individu sehingga sukar untuk dilaksanakan dalam jumlah besar.

Gambar 3.3 Kurva CERI untuk Indonesia



Dengan memanfaatkan *flexibel mechanism* yaitu CDM maka diharapkan negara berkembang, khususnya Indonesia dapat mengambil manfaat dari mekanisme tersebut dengan mengembangkan energi terbarukan. Pengembangan energi terbarukan disamping dapat mengurangi emisi juga mempunyai keuntungan yaitu:

- Mengurangi biaya investasi bagi negara berkembang
- Transfer teknologi
- Memperoleh teknologi yang ramah lingkungan

Energi terbarukan yang mempunyai prospek untuk dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi. Pengembangan kedua jenis pembangkit ini masih sulit dilaksanakan saat ini karena biaya investasinya tinggi. Biaya investasi yang harus dibayar oleh pemerintah diharapkan mendapatkan subsidi melalui CDM sehingga pengembangan energi terbarukan dapat menjadi ekonomis dan mampu bersaing dengan pengembangan energi fosil.

BAB IV

KEPENTINGAN INDONESIA PADA PENYELENGGARAAN *UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE* (UNFCCC) DI BALI

Perubahan iklim atau *Climate change*, pemanasan/penghangatan dunia atau global warming adalah dua kata yang selama sekitar 15 tahun terakhir ini menjadi hal yang sangat menakutkan bagi masyarakat di negara-negara yang diuntungkan karena terjadinya revolusi yang cenderung materialistis.

Penyebab utama terjadinya *Climate change* dan global warming, berawal dari revolusi industri sebagaimana diketahui bersama revolusi industri adalah perubahan teknologi, sosio ekonomi, dan budaya pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 yang terjadi dengan penggantian ekonomi yang berdasarkan pekerja menjadi yang didominasi oleh industri dan diproduksi mesin. Revolusi industri ini dimulai di Inggris, yang selanjutnya negara-negara industri identik dengan negara barat terutama Eropa, akan tetapi AS juga Jepang juga menjadi negara industri pada akhirnya.

Dampak Pemanasan global hingga kini makin terasa, bahkan sudah sangat meresahkan karena telah mempengaruhi kelangsungan hidup manusia di bumi. Menurut laporan Panel Antarpemerintah PBB mengenai perubahan iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC*), 10 April 2007, akan terjadi kenaikan suhu minimum dan maksimum bumi antara 0,5 hingga 1,5 derajat Celcius, lima tahun mendatang.

Perubahan iklim itu ditandai gejala kegagalan panen, kelangkaan air, naiknya permukaan air laut sehingga tenggelamnya daerah pesisir, merebaknya wabah penyakit berbahaya, banjir, dan kekeringan. Cina, India, dan Bangladesh akan terkena imbasnya berupa kelangkaan air yang mengakibatkan produksi pertanian akan anjlok sekitar 30 persen.

Pada tahun-tahun terakhir bencana perubahan iklim akan merenggut nyawa lebih dari tiga juta orang penduduk dunia, 800 juta korban, dan kerusakan langsung yang diakibatkannya melebihi 23 miliar dolar AS. Kerusakan tersebut, 90 persen terjadi di negara-negara berkembang yang lebih sedikit kontribusinya dalam meningkatkan pemanasan global.

Ahli meteorologi di *Massachusetts Institute of Technology*, Amerika Serikat, berpendapat bahwa pemanasan global sebagai salah satu akibat dari kerakusan manusia dalam merusak ekosistem hutan.

Rusaknya hutan yang memiliki fungsi sebagai penyerap karbon dioksida (*carbon sink*) dan daerah tangkapan air (*water catchment areas*) telah memicu peningkatan suhu bumi yang mengakibatkan melelehnya es di kutub. Penggunaan listrik dan bahan bakar fosil untuk adaptasi dan proses produksi akan meningkatkan produksi gas rumah kaca. Sedangkan penggunaan bahan baku biofuel untuk energi secara langsung memicu terjadinya kenaikan harga dan bahan pangan sehingga memperlemah perekonomian masyarakat.

Selain itu, dampak lain dari global warming adalah perubahan iklim sedunia dan kenaikan permukaan laut. Kenaikan permukaan laut akan mengakibatkan terendamnya daerah pantai yang rendah, termasuk Indonesia. Diperkirakan hujan

secara global akan bertambah, tetapi ada daerah yang hujannya akan berkurang dan ada pula yang bertambah. Hal ini akan mengacaukan sistem pertanian yang ada dan akan diperlukan biaya yang sangat besar untuk melakukan penyesuaian. Frekuensi dan intensitas badai dan topan mungkin meningkat. Perubahan iklim juga akan menyebabkan kepunahan banyak jenis.

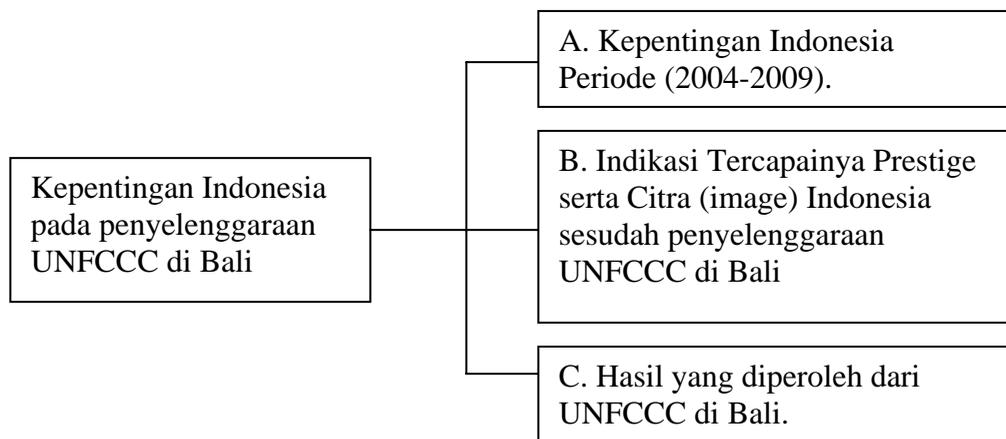
Dari uraian diatas maka, Indonesia sebagai negara yang mempunyai hutan tropik yang luas, akan tetapi dianggap juga sebagai penyumbang terbesar bagi global warming, diharapkan sangat perhatian dengan masalah tersebut dan diminta partisipasi aktif dalam penanggulangan dampak global warming itu sendiri.

Berkaitan dengan diselenggarakannya konferensi perubahan iklim di Bali 2007 yang lalu, momen ini tentu tidak disia-siakan begitu saja oleh Indonesia. Mengenai penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi mengenai perubahan iklim itu tentu tidak sembarangan. Hal ini berarti banyak bagi Indonesia. Selain itu Indonesia juga dapat mengembalikan citra buruk Indonesia yang terkenal sebagai sarang teroris khususnya di Bali. Dengan menyelenggarakan konvensi tersebut di Bali, Indonesia diharapkan para wisatawan dapat kembali berkunjung ke Indonesia khususnya Bali tanpa perasaan takut.

Melalui penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali Indonesia, diharapkan sebagai sarana untuk memperlihatkan potensi Indonesia di mata dunia secara keseluruhan terutama dalam perhatiannya terhadap perubahan iklim selain itu juga mengembalikan citra bangsa Indonesia di mata dunia. Hal ini tentu dapat memajukan di sektor pariwisata dan ekonomi Indonesia di mata dunia.

Dari konferensi ini prestige juga akan didapatkan Indonesia sebagai tuan rumah bagi penyelenggaraan UNFCCC di Bali selain itu juga dapat mengembalikan citra Indonesia yang dinilai buruk selama ini di mata dunia.

Gambar 4.1 Skema Kepentingan Indonesia pada penyelenggaraan UNFCCC di Bali.



A. Kepentingan Indonesia Periode (2004-2009)

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kepentingan nasional tersebut diaktualisasikan salah satunya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Polugri ini dituangkan kedalam program kerja kabinet, dan pada saat ini, kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2005 merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Kabinet Indonesia bersatu (2004-2009), yang konsisten diabdikan bagi kepentingan nasional.

Kepentingan nasional Indonesia diterjemahkan kedalam visi Departemen luar negeri yang disebut sebagai “Sapta Dharma Caraka”, yaitu: (1) Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia; (2) membantu pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerja sama pembangunan dan ekonomi, promosi dagang dan investasi, kesempatan kerja dan alih teknologi; (3) meningkatkan peranan dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN, peran aktif di Asia-Pasifik, membangun kemitraan strategis baru Asia-Afrika serta hubungan antar sesama negara berkembang; (4) memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme; (5) meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati hak asasi manusia, dan memajukan perdamaian dunia; (6) meningkatkan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri serta melancarkan diplomasi kemanusiaan guna mendukung tanggap darurat dan rekonstruksi Aceh dan Nias dari bencana gempa dan tsunami; (7) melanjutkan benah diri untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, budaya kerja dan profesionalisme pelaku diplomasi serta peranan utama dalam koordinasi penyelenggaraan kebijakan dan hubungan luar negeri.¹⁷

Seperti yang telah ditekankan, bahwa politik luar negeri Indonesia dirumuskan untuk memperjuangkan suatu kepentingan melalui hubungan atau

¹⁷ www.deplu.go.id

kerjasama dengan bangsa-bangsa di dunia. Kepentingan tersebut dapat bersifat global, regional dan nasional.

Untuk mencapai kepentingan Indonesia berkaitan dengan iklim, pemerintah melalui Departemen Lingkungan Hidup sebagai pelaksananya adalah Kementerian lingkungan hidup mempunyai beberapa program yang berkaitan dengan perubahan iklim diantaranya perlindungan ozon, langit biru, menuju Indonesia hijau, dan masih banyak lagi lainnya.

Isu perubahan iklim yang sesungguhnya bukan merupakan isu baru, telah mencuat menjadi isu global yang menonjol pada tahun 2007. Laporan IPCC dan laporan Nicholas Stern telah memberikan urgensi bagi upaya penanganan yang nyata dan segera untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Konferensi ke-13. Negara-negara Pihak UNFCCC dan Pertemuan ke-3 Negara-negara Pihak pada Protokol Kyoto menjadi tumpuan harapan bagi keberhasilan proses sampai dengan tahun 2009 guna menyiapkan kerangka komitmen baru yang akan menggantikan Protokol Kyoto pada tahun 2012.

Konferensi Bali sesungguhnya merupakan bagian dari rangkaian pertemuan sebelumnya yakni Montreal dan Nairobi, dan kemudian sesudah Bali, Polandia dan Denmark. Tetapi, rangkaian pertemuan tingkat tinggi seperti *EU Summit*, G8, APEC, *High Level Meeting SMU-PBB* serta *ASEAN/East Asia Summit* telah memberikan bobot politik dan ekspektasi yang besar agar Konferensi Bali dapat menghasilkan *Bali Road Map* yang memetakan prosedur dan mekanisme serta panduan substansi bagi guliran proses selanjutnya sampai dengan 2009.

Masalah perubahan iklim bukanlah masalah teknis lingkungan hidup semata, tetapi masalah yang sarat dengan aspek politik dan ekonomi. Karena itu, perundingan di Bali merupakan perundingan yang tidak mudah. Kepemimpinan Indonesia telah berhasil melahirkan *Bali Road Map* yang merupakan suatu terobosan bagi kebuntuan yang sebelumnya terjadi dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Konferensi Bali tentang perubahan iklim merupakan salah satu puncak tampilan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia. Bahkan tampilan Indonesia selaku tuan rumah Konferensi Bali telah menonjol pada rangkaian *summit* sebelum Bali. Inisiatif Indonesia mengenai hutan tropis (F-11 dan REDD) dan *Corral Triangle* juga telah mendapat tempat dalam Konferensi Bali dan karena itu masih akan ada tindak lanjutnya sebagai bagian dari upaya mitigasi terhadap perubahan iklim.

Isu utama yang harus ditangani dalam mengantisipasi perubahan iklim global adalah bagaimana agar sistem iklim bumi tidak terganggu dan terus memburuk. Para wakil pemerintah berbagai negara lalu membentuk sebuah panel untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan awal tentang isu ini. Setelah melalui proses yang panjang, kerangka PBB tentang Konvensi Perubahan Iklim (*UN Framework Convention on Climate Change*, UNFCCC) akhirnya diterima secara universal sebagai komitmen politik internasional tentang perubahan iklim pada KTT Bumi tentang Lingkungan dan Pembangunan (*UN Conference on Environment and Development*, UNCED) di Rio de Janeiro, Brasil, 1992.

B. Indikasi Tercapainya Prestige serta Citra (image) Indonesia sesudah penyelenggaraan UNFCCC di Bali.

Sebagai tuan rumah penyelenggara UNFCCC di Bali tentu akan sangat menguntungkan bagi Indonesia Indonesia akan memperoleh prestige karena telah mampu menyelenggarakan *event* ini dengan sukses dan aman. Selain itu konferensi ini digunakan Indonesia sebagai pemulihan citra Indonesia di mata dunia. Peserta konferensi ini berjumlah \pm 10.000 orang. Negara yang hadir dalam konferensi ini berjumlah sekitar 189 negara yang merupakan delegasi resmi dari badan-badan PBB , media massa, masyarakat, akademia, perusahaan dan lembaga lainnya yang memang berkomitmen terhadap lingkungan.

LSM asing / NGO yang hadir ada 393 nama yang tercatat 4.689 orang. Di mana beberapa LSM asing/ NGO itu masuk dalam delegasi R.I. diantaranya Kehati Foundation, Cifor, ICEL, WWF, Pelangi, CERINDO, dan IESR.

Pengamanan Konferensi Para Pihak ke-13 pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC di Bali, 3-15 Desember 2007, dilakukan kerjasama dengan kepolisian PBB mengingat *event* ini di bawah PBB akan tetapi mengambil tempat di Bali. Kepolisian PBB mengendalikan khususnya pada tempat-tempat pertemuan.

Koordinator Pelayanan Informasi Sekretariat UNFCCC yang berada di Bonn, Jerman, Kevin Grose, mengatakan, sebanyak 64 personel polisi PBB diberi wewenang penuh mengamankan kawasan Nusa Dua di ring I atau tempat utama pertemuan. Hal itu meliputi Bali International Convention Center (BICC) di Westin Hotel and Resort, Sheraton Lagoon., dan Grand Hyatt Hotel.

Di Ring I personil Polri juga ditempatkan. Pengamanan tamu very very important person (VVIP) atau setingkat presiden diserahkan pada Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dari Indonesia dan masing-masing negara.

Pengamanan tamu VIP atau setingkat menteri dan tamu reguler akan dilakukan Polri, sementara pengamanan secara umum dilakukan oleh Polri, TNI, serta unsur masyarakat setempat.

Penjagaan superketat diberlakukan di Nusa Dua Bali sebagai antisipasi utamanya adalah pada aksi terorisme dan separatisme. Kepolisian Daerah Bali mengerahkan enam regu (60) personel dari Markas Besar Polri. Dengan bersenjata lengkap ditempatkan di sejumlah titik di sepanjang garis pantai.

Selain dilengkapi juga dengan sejumlah kapal sejenis speedboat. Di tengah laut selatan kawasan Nusa Dua pun disiagakan tiga kapal polisi yang berjaga secara bergantian, yakni kapal Polri Baladewa, Bisma, dan Kresna. Sistem penjagaan ini dilakukan pada 26 November-15 Desember 2007.

Satuan anjing pelacak juga ditempatkan di empat pelabuhan resmi dan enam pelabuhan tidak resmi di seluruh Bali. Dua pelabuhan resmi terbesar, pelabuhan Gilimanuk dan Padang Bai yang merupakan pintu masuk Bali di bagian barat dan timur.

Dalam konferensi ini panitia menyediakan transportasi seperti penyediaan 120 bus untuk antar-jemput peserta konferensi Dimana bis ini digunakan untuk mengantar ke 69 hotel, 23 hotel di kawasan Nusa Dua (5.474 kamar), 19 di Jimbaran (880 kamar), 18 di Kuta (810 kamar), dan hotel di Sanur (845 kamar).

. Selain itu PT Angkasa Pura juga menyediakan 5 bandara untuk menerima kedatangan dan tempat parkir. Kelima bandara tersebut adalah bandara Ngurah Rai (Denpasar), bandara Juanda (Surabaya), bandara Selaparang (Lombok), bandara Hasanuddin (Makassar), dan bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta). Tiga terminal parkir di Ngurah Rai hanya mampu menampung 15 pesawat sehingga diperlukan bandara lain untuk menampung pesawat lain. Juanda, Selaparang, dan Hasanuddin dipilih karena paling dekat dengan Bali, sedangkan Halim dikhususkan untuk parkir pesawat-pesawat pribadi dan kepresidenan.

Konferensi ini dipusatkan di Bali Intercontinental Convention Center di The Westin Resort. Di sana tersedia dua ruang sidang pleno yang masing-masing memuat 1.300 dan 800 peserta sidang. Di mana keseluruhan ruang rapat ada 28 ruang rapat yang tersebar di Westin (2 ruang), BICC (12 ruang), The Laguna Resort (6 ruang), Grand Hyatt Hotel (8 ruang) serta didirikan tenda di sekitar hotel dikarenakan tidak cukup.

Dalam konferensi ini ada 1.158 jenis sidang yang terdaftar yaitu 800 sidang utama, 203 sidang sampingan, 118 sidang mini, dan 37 sidang paralel.

Untuk mendukung lancarnya konferensi ini, pada penyelenggaraan konferensi perubahan iklim di Bali, kawasan di Bali dibebaskan dari polusi udara yang bersumber dari asap kendaraan bermotor. Semua kendaraan yang digunakan, termasuk yang memasuki kawasan Nusa Dua, Bali. Diharuskan menggunakan bahan bakar minyak yang dipastikan ramah lingkungan, seperti jenis biopertamax dan bahan bakar nabati atau biofuel.

Untuk membebaskan kawasan itu dari polusi tersebut, sebanyak 12 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Nusa Dua dan sekitarnya siap dengan BBM ramah lingkungan. Selain itu, panitia menyediakan sekitar 500 sepeda di Nusa Dua. Sepeda itu dapat digunakan oleh peserta konferensi yang ingin berkeliling di sekitar kawasan tersebut.

Pihak Pertamina menyatakan siap memfasilitasi ketersediaan biopertamax dan biosolar di Denpasar dan Nusa Dua guna mendukung terciptanya kawasan bebas polusi di sana.

Biopertamax dan biosolar disiapkan di 10 SPBU di Denpasar dan Nusa Dua hal ini sekaligus untuk mengenalkan dua jenis bahan bakar itu kepada masyarakat Bali setelah sebelumnya diperkenalkan di Pulau Jawa..

Dengan peserta yang berjumlah \pm 10.000 orang dan negara yang hadir sekitar 189 negara. Jumlah lembaga swadaya masyarakat (NGO) asing adalah 393 nama dan tercatat 4.689. Dilihat dari banyaknya peserta yang hadir dalam ajang UNFCCC serta atas partisipasi dari masyarakat dunia dalam ajang ini, serta persiapan baik itu keamanan, penyediaan hotel, kawasan yang bebas polusi, serta tempat pertemuan yang terorganisasi dengan baik oleh Indonesia sebagai tuan rumah ini mengindikasikan keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan UNFCCC di Bali yakni memperoleh prestige karena Indonesia telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang sehingga kelak Indonesia tercatat sebagai negara yang dapat ikut serta dalam pencegahan dampak perubahan iklim itu sendiri. Perolehan prestige dan pemulihan citra Indonesia pasca UNFCCC akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Indikator Keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara UNFCCC (Prestige)

Prestige		
1.	Negara yang hadir	-dihadiri oleh \pm 10.000 orang - 189 negara yang merupakan delegasi resmi dari badan-badan PBB
2.	LSM Asing (NGO) yang Hadir	-393 nama LSM Asing yang tercatat 4.689 orang. -diantaranya Kehati Foundation, CIFOR, ICEL, WWF, Pelangi, CERINDO, IESR.
3.	Sistem Keamanan	-Polri, Pasukan Pengamanan Presiden (Pampres) tiap negara, TNI, unsur masyarakat setempat. -sebanyak 64 personel polisi PBB diberi wewenang penuh mengamankan kawasan Nusa Dua di ring I atau tempat utama pertemuan. -pengerahan enam regu (60 orang) personel di sepanjang garis pantai. -menyiagakan 3 kapal polisi: kapal Polri Baladewa, Bisma, dan Kresna. -penempatan anjing pelacak.
4.	Transportasi	-menyediakan 120 bus untuk antar jemput peserta. -menyediakan 5 bandara untuk menerima kedatangan dan tempat parkir. -5 bandara tersebut adalah bandara Ngurah Rai (Denpasar), bandara Juanda (Surabaya), Selaparang (Lombok), bandara hasanuddin (Makassar), dan Hali Perdanakusuma (Jakarta).
5.	Tempat Penyelenggaraan	-Bali Intercontinental Convention Center di “The Westin Resort”. -terdapat dua ruang sidang pleno yang memuat masing-masing 1.300 dan 800 peserta sidang. -keseluruhan ruang rapat ada 28 ruang rapat yang tersebar di Westin (2 ruang), BICC (12 ruang), The Laguna Resort (6 ruang), dan Grand Hyatt Hotel (8 ruang), ditambah tenda-tenda di sekitar hotel.
6.	Jenis Sidang	-1.158 jenis sidang yang terdaftar, 800 sidang utama, 203 sidang sampingan, 118 sidang mini, 37 sidang paralel.
7.	Kawasan Bebas Polusi	-penggunaan bahan bakar minyak ramah lingkungan, seperti jenis biopertamax dan bahan bakar nabati atau biofuel. -disediakan 12 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Nusa Dua dan sekitarnya. -menyediakan \pm 500 sepeda di Nusa Dua untuk peserta.

Selain memperoleh prestige, melalui penyelenggaraan konferensi ini Indonesia juga menggunakannya untuk mengembalikan citra Indonesia terutama Bali pasca serangan “Bom Bali”. Berikut akan dijelaskan mengenai pemulihan citra Indonesia terutama Bali pasca UNFCCC.

Tabel 4.2 Indikator Keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara UNFCCC (Citra/ image bangsa)

Citra (image) bangsa		
1.	Publikasi	-sekitar 1700 wartawan dari seluruh dunia yang meliput UNFCCC -UNFCCC diliput 2500 media, 2000 media asing dan 500 media lokal
2.	Keamanan	-kehadiran Al Gore yang merupakan mantan wakil Presiden Amerika Serikat yang meraih Nobel Perdamaian bersama dengan IPCC -tidak ada aksi terorisme dan separatisme
3.	Meningkatnya jumlah wisatawan	-Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut kebangsaan, Juli 2008 (lihat Tabel 4.4)

Melalui publikasi atas penyelenggaraan UNFCCC di Bali yang dilakukan oleh sekitar 1700 wartawan dari seluruh dunia yang berasal dari 2500 media asing dan 500 media lokal maka citra Indonesia terutama Bali di mata dunia akan membaik, karena selama ini Indonesia dicap sebagai sarang teroris pasca serangan bom di Bali beberapa waktu yang lalu. Publikasi yang dilakukan terhadap konferensi ini mengindikasikan Bali telah aman dan tidak seseram yang diberitakan selama ini. Selain itu kedatangan Al-Gore yang merupakan mantan wakil Presiden Amerika Serikat yang meraih penghargaan nobel Perdamaian bersama dengan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) untuk usaha membangun dan menyebarkan pengetahuan mengenai perubahan iklim yang disebabkan manusia serta dalam merintis langkah-langkah yang diperlukan untuk

melawan perubahan tersebut juga ikut mengangkat citra Indonesia di mata dunia, karena kedatangan Al Gore yang diberlakukan pengamanan ekstra khusus tamu VVIP mengindikasikan kepercayaan akan tingkat keamanan di Bali, Indonesia sehingga ia mau datang dalam konferensi tersebut. Selain itu juga tidak terjadi aksi terorisme dan separatisme karena diberlakukannya pengamanan super ketat. Dengan publikasi serta pulihnya kepercayaan akan keamanan di Bali, Indonesia jumlah wisatawan asing yang berkunjung menjadi meningkat.

Dari data terbaru yang diperoleh, setelah diadakannya *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali selama periode Januari-Juli 2008 mencapai 1.110.251 orang atau meningkat 21,64 persen dibandingkan dengan jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2007 yang hanya mencapai 912.720 orang. Untuk periode Januari-Juli tahun 2008, wisman dengan kebangsaan Jepang, Australia, Taiwan, Korea Selatan, dan Republik Rakyat Cina menempati jumlah terbanyak, dengan prosentase masing-masing sebesar 18,80 persen, 14,90 persen, 7,66 persen, 7,10 persen, dan 6,53 persen.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali pada bulan Juli 2008 mencapai 183.325 orang. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 11,12 persen dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, jumlah wisman yang datang melalui Pelabuhan Udara Ngurah Rai mengalami peningkatan sebesar 11,12 persen. Angka ini meningkat sebesar 7,02 persen dibandingkan dengan keadaan bulan Juni 2008. wisman yang datang melalui pelabuhan laut pada bulan

Juli 2008 berjumlah 47 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Juni 2008.

Tabel 4.3 Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Pelabuhan, Januari – Juli 2008 dan 2007

No.	Pelabuhan	Tahun 2008			Tahun 2007		Perubahan			Peran Juli 08 Thd Total Juli (%)	Peran Jan-Juli 08 thd Total 2008 (%)
		Juni (Orang)	Juli (Orang)	Januari-Juli (Orang)	Juli (Orang)	Januari-Juli (Orang)	Juli Thd Juni 2008 (%)	Juli 2008 Thd Juli 2007 (%)	Jan-Juli 2008 Thd 2007		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pelabuhan Udara	171.257	183.278	110.8334	164.929	911.876	7,02	11,12	21,54	99,97	99,83
2	Pelabuhan Lut	44	47	1,917	43	844	6,82	9,30	127,13	0,03	0,17
	Jumlah	171.301	183.325	111.0251	164.972	912.720	7,02	11,12	21,64	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Bali No. 03/08/51/Th. II, 2 September 2008

Menurut kebangsaan, wisman yang paling banyak datang ke Bali pada bulan Juli 2008 adalah wisman dengan kebangsaan Jepang, Australia, Taiwan, Malaysia, dan RRC dengan prosentase masing-masing sebesar 19,50 persen, 18,39 persen, 6,88 persen, 6,24 persen, dan 5,19 persen. Tabel 4.4 menyajikan data wisman dari 10 negara terbanyak yang berkunjung ke Bali pada bulan Juli 2008.

Tabel 4.4 Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Kebangsaan, Juli 2008

No.	Kebangsaan	Wisman Juli 2008				Wisman Juni 2008 (Orang)	Wisman Juli 2007 (Orang)	Prosentase Wisman Juli 2008 thd Juni 2008	Prosentase Wisman Juli 2008 thd Juli 2007
		Pel. Udara (Orang)	Pel. Laut (Orang)	Total (Orang)	Prosentase (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jepang	35.745	0	35.745	19,50	30.663	33.104	16,57	7,98
2	Australia	33.700	7	33.707	18,39	29.559	20.358	14,03	65,57
3	Taiwan	12.618	0	12.618	6,88	12.031	15.525	4,88	-18,72
4	Malaysia	11.445	0	11.445	6,24	11.205	8.494	2,14	34,74
5	Republik Rakyat Cina	9.515	0	9.515	5,19	7.952	8.330	19,66	14,23
6	Korea Selatan	9.397	0	9.397	5,13	12.074	11.144	-22,17	-15,68
7	Belanda	8.204	1	8.205	4,48	5.297	7.748	54,90	5,90
8	Inggris	7.548	7	7.555	4,12	7.209	6.871	4,80	9,95
9	Amerika Serikat	7.529	5	7.534	4,11	7.021	5.868	7,31	28,39
10	Perancis	6.789	6	6.795	3,70	6.461	6.716	5,17	1,18
11	Lainnya	40.788	21	40.809	22,26	41.829	40.814	-2,44	-0,01
	Jumlah	183.27	47	183.325	100,00	171,301	164.972	7,02	11,12

Sumber : BPS Provinsi Bali No. 03/08/51/Th. II, 2 September 2008

Dibandingkan dengan keadaan wisman bulan Juli 2007, kedatangan wisman berkebangsaan Jepang, Australia, Malaysia, RRC, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada bulan Juli 2008 mengalami peningkatan, sebaliknya wisman berkebangsaan Taiwan dan Korea Selatan mengalami penurunan. Wisman dari Taiwan menurun dikarenakan di Taiwan terjadi Badai Khalmaedi (Rabu, 16 Juli 2008) dimana badai yang terjadi di laut bisa mendorong terjadinya gelombang yang tinggi dan menyebabkan hambatan bagi transportasi laut¹⁸ hal inilah yang menyebabkan wisman dari Taiwan mengalami penurunan melalui jalur laut. Sedangkan wisman Korea Selatan mengalami penurunan dikarenakan di Korea Selatan terjadi demo besar-besaran atas kenaikan solar sehingga pelabuhan lumpuh ini juga yang menyebabkan wisman dari Korea Selatan mengalami penurunan juga karena adanya virus flu burung yang mewabah di Indonesia. Prosentase peningkatan dan penurunan kedatangan wisman pada bulan Juli 2008 dibandingkan dengan bulan Juli 2007 disajikan pada Tabel 4.4.

Dari 10 negara dengan jumlah wisman terbanyak datang ke Bali pada Juli 2008, seluruhnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan kedatangan wisman pada bulan Juni tahun 2008, kecuali wisman dengan kebangsaan Korea Selatan. (lihat pada Tabel 4.4) Akan tetapi penurunan ini tidak lah terlalu berpengaruh banyak bagi kemajuan pariwisata di Bali, karena yang menyebabkan penurunan juga bukan karena penyelenggaraan UNFCCC yang tidak terselenggara baik, akan tetapi seperti masalah cuaca, serta ketakutan akan wabah virus flu burung yang terjadi di Indonesia waktu itu dan adanya demo massal di dunia atas kenaikan solar dan terjadi

¹⁸ [http:// kadarsah.wordpress.com/2008/07/](http://kadarsah.wordpress.com/2008/07/)

juga di Korea Selatan sehingga mengakibatkan pelabuhan lumpuh dan mengganggu transportasi laut.

Dengan begitu, peningkatan jumlah wisatawan mengindikasikan citra Bali di mata dunia pulih sesudah penyelenggaraan UNFCCC di Bali, ini juga didukung prestige yang diperoleh sehingga mengindikasikan keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah bagi penyelenggaraan *event* besar tahunan di bawah PBB ini.

C. Hasil dari UNFCCC di Bali.

Indonesia meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) melalui UU No. 6 tahun 1994. Tujuan konvensi ini adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kondisi iklim di dunia. Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 1994 setelah diratifikasi oleh 50 negara.

Pada Pertemuan Para Pihak yang ke-3 di Kyoto, Jepang (1997), sebuah tata cara penurunan emisi gas rumah kaca disepakati oleh Para Pihak Kesepakatan yang dikenal sebagai Protokol Kyoto ini menargetkan dan menjadwalkan penurunan emisi yang harus dilakukan negara Annex-1 (yang terdiri dari negara industri serta negara dengan ekonomi dalam transisi), yaitu sebesar 5,2% dari tingkat emisi bersama mereka di tahun 1990. Target ini harus dicapai dalam Periode Komitmen Pertama yaitu 2008-2012.

Posisi Indonesia dalam percaturan isu perubahan iklim global sangat ditentukan oleh perspektif bahwa kita adalah bagian dari masyarakat dunia yang juga

dapat memberikan andil besar dalam mereduksi pemanasan global. Kepentingan yang sepatutnya Indonesia perjuangkan adalah wujud dari persoalan sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakatnya yang kemudian diintegrasikan dengan persoalan perubahan iklim. Kondisi ini perlu mendapat tekanan, mengingat kenyataan yang terjadi bahwa persoalan lingkungan di negara-negara berkembang tidak dapat lepas dari konteks sosial dan ekonomi masyarakat seperti tuntutan terhadap konservasi hutan, serta terjadinya peningkatan aktivitas industri untuk mencapai standar kesejahteraan yang setara dengan Negara Annex-1, mengakibatkan terjadinya tekanan terhadap negara berkembang. Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism) selalu diangkat sebagai *bantuan* dari Annex-1 kepada Non-Annex-1 dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutannya.

CDM dirancang sebagai bentuk investasi berbasis pasar dengan sertifikat penurunan emisi (*certified emission reduction/CER*) sebagai komoditasnya. Negara industri bisa membeli sertifikat dari negara berkembang lewat proyek hijauanya. Ada dua jenis perdagangan karbon. Pertama adalah perdagangan emisi (*emission trading*). Yang kedua adalah perdagangan kredit berbasis proyek (*trading in project based credit*). Seringkali dua kategori tersebut disatukan menjadi sistem perdagangan hibrida. Namun dalam bentuknya ada 3 opsi yaitu mengurangi emisi, saling memperdagangkan hak emisi, atau membeli kredit di luar negeri. Disisi lain lewat lembaga keuangan internasional memberikan bantuan untuk program CDM terutama negara berkembang untuk proyek-proyek penanaman pohon. Tentunya tidak menutup kemungkinan wilayah-wilayah yang telah di cap sebagi proyek CDM itu nantinya akan di perdagangan di pasar saham internasional yang ditawarkan kepada

perusahaan-perusahaan raksasa penyumbang emisi.royek-proyek yang sudah disetujui masuk dalam mekanisme CDM antara lain adalah proyek pembangkit energi alternatif tenaga hidro, angin, biomassa dan energi terbarukan lainnya. Proyek lain adalah efisiensi energi, agroforestry, *Coal Mine Methane*, *Landfill gas* dan limbah peternakan, HFC serta N₂O. Sedangkan proyek-proyek yang potensial namun belum dimasukkan dalam mekanisme CDM adalah proyek transportasi, energi efisiensi di gedung-gedung, labelisasi produk hemat energi, deforestasi dan aforestasi.

Selain itu program REDD yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan Konsep optimalisasi hutan sebagai penyerap karbon akan secara langsung mendorong perbaikan sistem dan kebijakan perencanaan tata ruang dan guna lahan yang berpengaruh langsung pada pengentasan kemiskinan. Posisi Indonesia sebagai negara berkembang menyebabkan partisipasi mitigasi perubahan iklim akan berkaitan langsung dengan usaha pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Demikian ditegaskan oleh Emil Salim, Ketua Delegasi Indonesia pada UNFCCC pada saat mengadakan konferensi pers di Pavilion Indonesia, di Nusa Dua-Bali. Ia mengemukakan bahwa perlu dibedakan bentuk implementasi komitmen Indonesia secara global dan nasional. Proposal Rencana Aksi Nasional mendukung posisi negosiasi Indonesia, namun penyempurnaan isinya yang masih berlangsung hingga saat ini tidak akan menentukan hasil kesepakatan yang akan dicapai secara global. Dicontohkan olehnya bahwa, usaha untuk secara konkret mengedepankan lahan gambut sebagai potensi dalam REDD (*Reducing Emissions from Deforestation*

and Degradation) dan perbaikan implementasi kebijakan hutan Indonesia adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sendiri oleh Pemerintah.

Ia menjelaskan pula bahwa skema-skema mekanisme pembangunan bersih atau CDM akan menjadi bagian integral dalam negosiasi-negosiasi selanjutnya, dan Indonesia mendorong usaha penyederhanaan mekanisme tersebut untuk mendorong optimalisasi penggunaannya.

Karbon ofset Konferensi COP-13 di Bali kali ini diperkirakan akan mencapai 47.000-50.000 ton setara CO₂ dan akan dikompensasikan pada penanaman pohon dan tanaman kayu di berbagai tempat di Jawa Barat, Riau, dan Kalimantan.

Komitmen Amerika Serikat (AS) untuk membantu program reforestasi di Indonesia senilai 20 juta dolar AS dan kemudian bantuan kemitraan hutan dan iklim dari Australia senilai 100 juta dolar Australia perlu disambut baik, sebagai kesadaran global penyelamatan hutan dan ancaman perubahan iklim.

Pada UNFCCC di Bali kemarin telah menghasilkan beberapa hal, sesuai yang dikemukakan oleh Presiden COP 13 Rahmat Witoelar.

Tiga hal penting yang merupakan hasil UNFCCC yaitu, pertama, tercapainya kesepakatan dunia yang disebut *Bali Roadmap*.

Kedua, disepakatinya 4 agenda yaitu :

1. Aksi untuk melakukan kegiatan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim (mis. Kekeringan dan banjir).
2. Cara-cara untuk mereduksi emisi GRK
3. Cara-cara untuk mengembangkan dan memanfaatkan climate friendly technology
4. Pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi.

Dan kesepakatan ketiga, adanya target waktu, yaitu 2009.

Sedangkan *Bali Roadmap* sendiri meliputi lima hal yaitu Komitmen Pasca 2012 (*AWG on long-term cooperative action under the convention*), adaptasi/Dana Adaptasi (*Adaptation Fund*), alih Teknologi (*Technology transfer*), REDD (*Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries*) dan CDM (*Clean Development Mechanism*)

Berikut penjelasan lebih detail soal *Bali Roadmap*:

1. Komitmen Pasca 2012 (*Dialogue & AWG*)

Semua Parties menyadari diperlukannya reduksi penurunan emisi global yang lebih besar (*deeper cut*) sebesar 25-40% sebagai komitmen lanjutan dari negara maju (*annex-I Protokol Kyoto*) sesuai dengan AR4 IPCC. Proses penyelesaian hingga 2009 (*Ad-Hoc Working Group on Long Term Cooperative Action under the Convention*). Peningkatan aksi mitigasi perubahan iklim secara nasional internasional dalam kerangka *common but differentiated responsibilities*: Negara maju untuk komitmen membentuk rencana aksi dalam melakukan langkah menurunkan emisi GRK yang terukur, dilaporkan dan terverifikasi. Negara berkembang melakukan mitigasi dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan melalui bantuan teknologi, peningkatan kapasitas, pendanaan, melalui cara-cara terukur, nyata dan dapat dilaporkan.

2. Dana Adaptasi

Tindakan aksi adaptasi seperti kerjasama internasional dalam kajian kerentanan, kajian kebutuhan pendanaan. Disepakatinya elemen operasional *Adaptation Fund*, yaitu: *operating entity*, fungsi, komposisi keanggotaan, quorum,

pengambilan keputusan, *chairmanship, frequency of meetings, observer,* transparansi, *secretariat, trustee, monetization, access to funding,* pengaturan institusi, dan review. Badan Dana Adaptasi (*Adaptation Fund Board*) sebagai *operating entity*, GEF sebagai Sekretariat dan *trustee* oleh World Bank. Perwakilan Indonesia (Mahendra Siregar) disetujui sebagai Chairman of Adaptation Fund Board. Pendanaan adaptasi bersumber dari 2% hasil penjualan CER (*certified emissions reduction*) dari proyek CDM yang memiliki dana Euro 37 juta (akan meningkat 80-300 juta USD periode 2008-2012).

3. Transfer Teknologi

Peningkatan tindakan pengembangan teknologi dan transfer pada dukungan aksi mitigasi dan adaptasi (Peningkatan dari tingkat pembahasan teknis hingga implementasi). Mempercepat jalan penyebaran, penggunaan dan transfer teknologi yang ramah lingkungan. Peningkatan aksi pada penyediaan sumber keuangan dan dukungan investasi pada tindakan mitigasi dan adaptasi serta kerjasama teknologi. Memperkuat akses pendanaan bagi negara berkembang GEF sebagai *operational entity* untuk penerapan konvensi akan menyiapkan "*a strategic program*" untuk peningkatan *development, deployment, diffusion* teknologi.

4. *Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries* (REDD)

Semua Negara pihak menyepakati bahwa langkah nyata dalam mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan merupakan kepentingan mendesak. Program kerja telah ditetapkan dan difokuskan pada, misalnya, kajian perubahan tutupan lahan dan emisi GRK, metode untuk mendemonstrasikan pengurangan emisi dari deforestasi. Hal ini penting untuk mengangkat kebutuhan komunitas lokal dan

warga asli. Persetujuan dilakukannya *demonstration activities* degradasi, deforestasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dimasukkan dalam mekanisme *REDD National dan Sub-National baselines*

5. *Clean Development Mechanism (CDM)*

Distribusi pelaksanaan CDM sampai *level sub-regional* .*Programmatic of activity* sudah dapat diusulkan ke *Executive Board* .Perubahan Skala AR CDM dari 8 kton menjadi 16 kton yang dilakukan oleh masyarakat berpendapatan rendah, dengan kriteria *low income communities* ditentukan oleh negara tuan rumah. Langkah ini akan memperluas jumlah proyek dan distribusi proyek di Negara-negara yang sebelumnya tidak dapat ikut serta dalam kategori proyek ini.*Carbon Capture and Storage* Negara pihak mempertimbangkan dimasukkannya CCS-formasi geologi ke dalam proyek CDM. Mereka menyepakati untuk meneruskan kajian lebih jauh dan menyusun rencana kerja tahun 2008 (teknis, legal, kebijakan dan aspek pendanaan). CCS secara luas diakui sebagai teknologi penting untuk melanjutkan penggunaan bahan bakar minyak yang “bersih”.LDC, *Least Developed Countries* negara pihak menyetujui untuk memperpanjang mandate *LDC’s Expert Group*. Group ini memberikan saran mengenai kajian adaptasi yang diperlukan LDC,mengingat kebutuhan adaptasi di LDC harus didukung karena kapasitas yang rendah dalam beradaptasi. ¹⁹

Road Map tersebut menentukan parameter dan tujuan yang akan dibahas bersama dan mencapai kesepakatan akhir dalam konferensi tahun 2009 di Kopenhagen, Denmark. Kesepakatan tersebut akan menjadi pedoman baru setelah Protokol Kyoto berakhir.

¹⁹ Dikutip dari detikcom tanggal 19/12/2007

BAB V

KESIMPULAN

Perhelatan internasional yang membicarakan tentang pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*) telah berlangsung di Nusa Dua, Bali, Indonesia. Para delegasi dari berbagai negara anggota UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) telah hadir guna mengikuti COP (*The Conference of the Parties*) Ke-13 yang membahas fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang telah mengancam makhluk hidup di bumi ini. Indonesia merupakan salah satu di antara 189 negara anggota UNFCCC yang sangat penting dalam meminimalisasi meningkatnya pemanasan global dan perubahan iklim. Sebab, Indonesia memiliki ribuan hektare hutan yang mampu menyerap CO₂ (karbondioksida) sebagai zat utama penyebab terjadinya global warming and climate change. Sebagai negara yang mempunyai peran signifikan sebagai *the defender of the earth*, Indonesia akan banyak diharapkan oleh negara-negara maju untuk menjaga dan melindungi hutannya United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang diselenggarakan di Bali yang lalu menghasilkan beberapa hal Tiga hal penting yang merupakan hasil UNFCCC yaitu, pertama, tercapainya kesepakatan dunia yang disebut Bali Roadmap. Kedua, disepakatinya 4 agenda ya : 1. Aksi untuk melakukan kegiatan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim (misal Kekeringan dan banjir). 2. Cara-cara untuk mereduksi emisi GRK 3. Cara-cara untuk mengembangkan dan memanfaatkan climate friendly technology 4. Pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi. Dan

kesepakatan ketiga, adanya target waktu, yaitu 2009. Sedangkan Bali Roadmap sendiri meliputi lima hal yaitu Komitmen Pasca 2012 (AWG on long-term cooperative action under the convention), adaptasi/Dana Adaptasi (Adaptation Fund), alih Teknologi (Technology transfer), REDD (Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries) dan CDM (Clean Development Mechanism).

Atas kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan UNFCCC, Indonesia mempunyai beberapa kepentingan. Kepentingan itu bisa berbagai macam, baik itu bersifat politik, ekonomi dan tentu saja yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Dengan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan konferensi ini Indonesia telah memperoleh prestige, karena *event* ini merupakan *event* akbar yang digerakkan oleh PBB yang dihadiri hampir dari keseluruhan masyarakat dunia. Baik itu peserta yang datang dari berbagai belahan dunia, LSM-LSM asing, serta wartawan-wartawan dari media asing maupun lokal meliput adanya *event* ini. *Event* ini merupakan ajang pembuktian bagi Indonesia bahwa Indonesia meskipun negara yang selalu dianggap remeh, bukan negara maju, mampu menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan *event* akbar berkaitan dengan masalah lingkungan dan terselenggara dengan sukses dan aman. Hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan bagi *event* ini sangat diperhatikan oleh Indonesia sebagai tuan rumah seperti keamanan, penyediaan transportasi, penyediaan tempat konferensi, suasana atau lingkungan yang nyaman serta mendukung bagi terlaksananya konferensi ini, semua telah terorganisasi dengan baik demi terselenggaranya konferensi dengan sukses.

Selain itu, Indonesia juga dapat memperbaiki citranya sebagai negara “sarang teroris” pasca serangan “bom Bali” sehingga kepercayaan masyarakat dunia terhadap Indonesia kembali pulih. Pada konferensi ini juga telah dihasilkan yakni “Bali Road Map” dimana didalamnya mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pencegahan global warming, yakni mekanisme atau aturan-aturan yang dibuat untuk mengurangi dampak dari global warming di luar Protokol Kyoto.

Dengan begitu tercapai lah prestige Indonesia atas kesediaannya menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan konferensi perubahan iklim ini yakni karena Indonesia telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk terselenggaranya konferensi ini dengan aman dan sukses sehingga kelak Indonesia dicatat sebagai salah satu negara yang ikut dalam pencegahan dampak global warming yakni dengan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan konferensi perubahan iklim yang merupakan *event* akbar tahunan di bawah PBB. Selain itu pemulihan citra Indonesia sebagai sarang teroris berangsur pulih, sehingga berdampak bagi pariwisata dan perekonomian Bali yang cenderung membaik ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing pasca diadakannya konferensi ini. Ini membuktikan tingkat kepercayaan dunia terhadap Bali yang sudah jauh lebih aman dan tidak seperti diberitakan pasca serangan “Bom Bali”.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Charles W. Kegley, Jr. 2001. *The Global Agenda (Sixth Edition) Issues and Perspectives*. The Mc Graw – Hill. Companies. Inc. Ny. 10020.
- Coplin, William D. 1992. *Dalam Pengantar Politik Internasional (Telaah dan Teoritis)*. Bandung : Pustaka Sinar Baru.
- David Peper. 1996. *Modern Environmentalism an Introduction*. London : Rontledge.
- H.J. Morgenthau. 1991. *Politik Antar Bangsa Buku Ketiga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mas'oed, Mochtar. 1994 *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1993. *Pol LN Indonesia dan Pelaksanaan Dewasa Ini*. Bandung: Alumni.
- Muryarso, Daniel, ed. *Laporan IPCC/Intergovernmental Panel on Climate Change*
- Otto Soemarwoto. 1991. *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Plano, Jack. C dan Roy Olton. 1969 . *International Relations Dictionary*, Rinehart and Winstone Inc. USA,
- Rahmat Bowo Suharto. 2001. *Pelindungan Hak Dunia Ketiga Atas SDA*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

www. wikipedia .com

Balipost. Online

Adj 94. wordpress.com

http://unfcc.int/files/essential_badeground/kyoto_protocol/aplication/pdf/kpstats.pdf
diakses pada tanggal 28 Juli 2008

<http://www.menlh.go.id/slhi/proseding2007/10%20notulensi.pdf>
diakses pada tanggal 7 Agustus 2008

<http://www.indonesiamission-ny.org/press/prog2407.htm>.
diakses pada tanggal 7 Agustus 2008

<http://www.topix.com/forum/world/malaysia/TP166VFSEBCKQURL>
diakses pada tanggal 7 Agustus 2008

<http://www.depkominfo.go.id/portal?act> diakses 7 Agustus 2008

walhi.or.id. diakses 4 September 2008

<http://www.bps.go.id/> diakses pada tanggal 16 September 2008

http://bali.bps.go.id/2006/pressrelease/03_tourism/par-09-2008.pdf diakses pada
tanggal 16 September